



# CITRA KOTA PALU DALAM ARSIP



ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA  
JAKARTA 2015



# CITRA KOTA PALU DALAM ARSIP

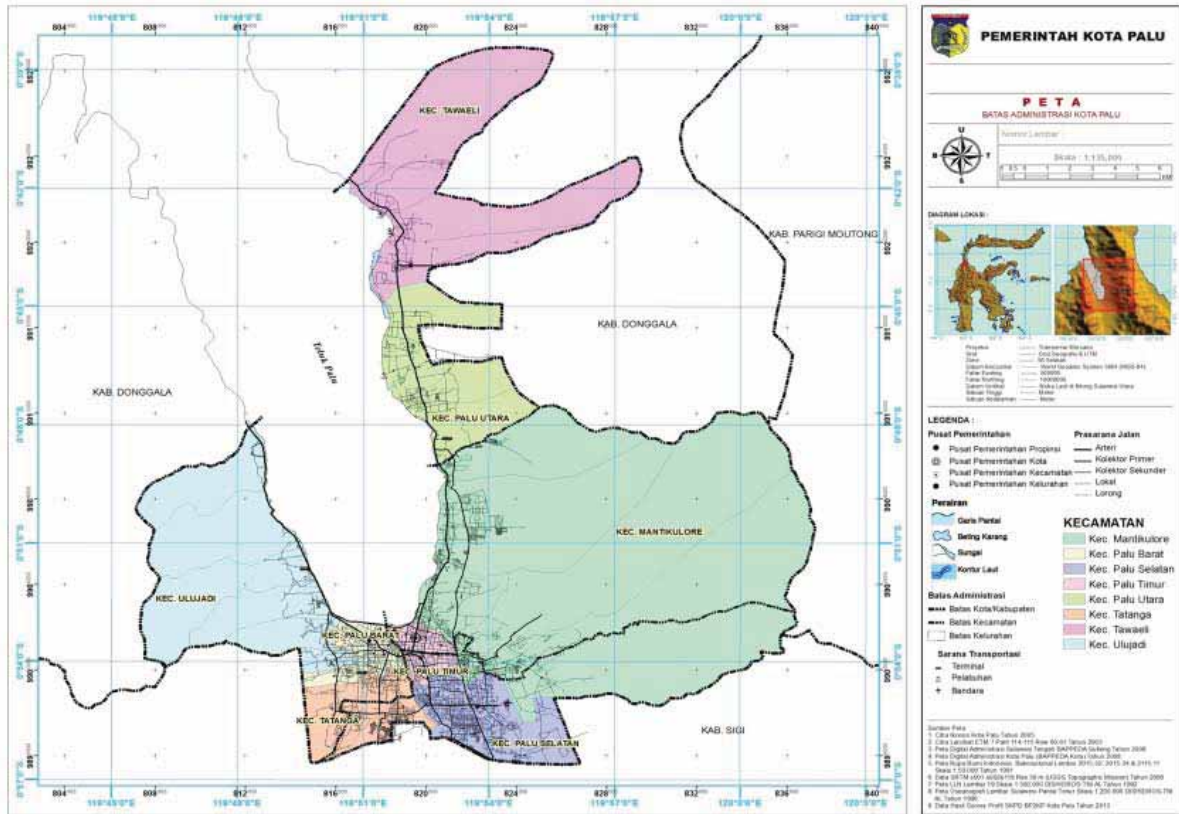


**Arsip Nasional Republik Indonesia**

Jl. Ampera Raya No. 7, Cilandak Timur, Pasar Minggu, Jakarta Selatan 12560

Telp. 62-21-7805851, Fax.62-21-7810280, 7805812

<http://www.anri.go.id>, e-mail: [info@anri.go.id](mailto:info@anri.go.id)



Peta Wilayah Kota Palu  
*Sumber : Kantor Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi Kota Palu*





Lambang Pemerintah Kota Palu



H. Rusdy Mastura  
Walikota Palu  
Periode 2005 - sekarang



H. A. Mulhanan Tombolotutu, SH  
Wakil Walikota Palu  
Periode 2008 - sekarang



Drs. H. Aminuddin Atjo, M.Si  
Sekretaris Daerah Kota Palu  
Periode 2011- sekarang



Mohammad Iqbal Andi Magga, SH.  
Ketua DPRD Kota Palu  
Periode 2014 - sekarang



## WALIKOTA PALU DARI MASA KE MASA



Drs. H. Kisman Abdullah  
Walikota periode  
1978-1986



Drs. Sahbuddin Labadjo  
Walikota periode  
1986- 1994



Rully A. Lamadjido, SH  
Walikota periode  
1995 - 2000.



H. Baso Lamakarate  
Walikota periode  
2000 - 2005



H. Suardin Suebo, SE  
Walikota periode  
2005



h. Rusdy Mastura  
Walikota periode  
2005 - sekarang

**SAMBUTAN**  
**KEPALA ARSIP NASIONAL RI**



## SAMBUTAN KEPALA ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA

Indonesia terdiri atas beribu-ribu pulau, berbagai suku bangsa, beragam agama dan budaya. Keunikan Indonesia terletak pada keanekaragaman tersebut. Keanekaragaman yang disandang Indonesia menjadi indah bagaikan warna-warni pelangi. Keanekaragaman Indonesia tersebut kemudian mengkrystal dalam semboyan **Bhinneka Tunggal Ika**.

Keanekaragaman dan warna-warni indah Indonesia tergambar secara beruntun dalam perjalanan sejarahnya yang penuh dinamika. Perjalanan sejarah Indonesia tersebut terekam dalam arsip, baik dalam arsip konvensional maupun dalam arsip media baru. Arsip menjadi deposit sejarah yang terus bertumbuh secara akurat. Sehingga tidaklah berlebihan apabila dikatakan bahwa: “Dari semua asset yang ada, arsip adalah asset negara yang paling berharga” (Sir Arthur Doughty, 1924). Wilayah boleh membelah diri, daerah boleh mengurus diri sendiri-sendiri, tetapi arsip tetap sebagai jati diri. Arsip merupakan warisan nasional. Oleh karenanya arsip perlu diselamatkan, dipelihara, dan dilestarikan. Keberadaban suatu bangsa dapat dilihat dari seberapa utuh dan lengkap arsipnya (Sir Arthur Doughty, 1924).

Khazanah kearsipan mengenai Kota Palu banyak tersimpan di Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI), baik menyangkut adat istiadat, kebudayaan, kehidupan politik, kunjungan kenegaraan, baik dalam negeri maupun luar negeri, dan arsip yang merefleksikan keindahan seni dan budaya Kota Palu. Dalam rangka penguatan otonomi daerah, arsip tersebut diinformasikan kembali kepada masyarakat Kota Palu melalui program ANRI yang disebut dengan Citra Daerah. Program Citra Daerah pada dasarnya merupakan upaya mengungkapkan kembali memori kolektif daerah yang terekam dalam Citra Kota Palu Dalam Arsip.

Program Citra Daerah bertujuan meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat terhadap nilai-nilai budaya yang berkembang di

lingkungannya, memupuk kebanggaan dan rasa cinta terhadap Tanah Air, menghargai keberagaman, membangun solidaritas, memupuk rasa persatuan dan memperkokoh kesatuan bangsa, sekaligus mendukung pelaksanaan **Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014** tentang Pemerintah Daerah.

Citra Daerah ini diterbitkan dengan dukungan data yang terkandung dalam arsip. Citra Daerah merefleksikan bagaimana suatu daerah ikut berperan, memberi warna dan corak dalam sejarah perjalanan bangsa dari masa ke masa. Khazanah arsip tersebut memberikan informasi yang akurat dan obyektif mengenai perjalanan sebuah daerah dalam membangun kehidupan berbangsa dan bernegara dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), yang terekam dalam arsip baik dalam bentuk teks, peta, maupun foto mengenai sebuah daerah. Citra Daerah merupakan rumusan dari kearifan lokal yang dimiliki sebuah daerah.

Citra Daerah merupakan satu kesatuan informasi yang menggambarkan dinamika kolektif sebuah daerah. Sebuah dinamika kolektif yang terbentuk di atas kesadaran sejarah yang dialami bersama. Kesadaran sejarah ini diharapkan dapat menjadi landasan moral yang kokoh untuk pijakan melompat ke masa depan yang lebih baik. Kesadaran sejarah ini merupakan modal dasar yang kokoh dalam memperkuat pengembangan Otonomi Daerah. Daerah yang kuat dan berkarakter menjadi prasyarat tegaknya NKRI. Citra Daerah Kota Palu jauh dari sempurna. Keterbatasan halaman menjadikan Citra Daerah hanya memuat sebagian kecil dari data kearsipan mengenai Kota Palu yang tersimpan di ANRI. Namun demikian kehadiran Citra Daerah ini diharapkan dapat mendorong berkembangnya program lanjutan dari Pemerintah Daerah Kota Palu khususnya di sektor kearsipan. Selamat ulang tahun Kota Palu ke-37. Jaya selalu!

Jakarta, 27 September 2015

**Kepala,**

**Dr. Mustari Irawan**



## DAFTAR ISI

Peta Wilayah Kota Palu _____	i
Lambang Pemerintah Daerah Kota Palu _____	ii
Walikota Palu _____	iii
Wakil Walikota Palu _____	iv
Sekretaris Daerah Kota Palu _____	v
Ketua DPRD Kota Palu _____	vi
Walikota Palu dari masa ke masa _____	vii
Sambutan Kepala Arsip Nasional RI _____	viii
Daftar Isi _____	xi
<b>PENDAHULUAN</b> _____	<b>1</b>
A. Latar Belakang _____	2
B. Sejarah Kota Palu _____	3
C. Masa Penjajahan _____	4
D. Masa Pergerakan _____	5
E. Masa Pendudukan Jepang _____	6
F. Masa Republik Indonesia _____	7
G. Daftar Pustaka _____	9
<b>CITRA KOTA PALU DALAM ARSIP</b> _____	<b>10</b>
A. Geografis _____	11
B. Politik dan Pemerintahan _____	14
C. Keagamaan _____	35
D. Sosial dan Budaya _____	45
E. Pendidikan _____	52
F. Transportasi dan Komunikasi _____	56
G. Infrastruktur _____	64
H. Perekonomian _____	84
<b>Daftar Arsip</b> _____	<b>90</b>
<b>Penutup</b> _____	<b>98</b>

# PENDAHULUAN

# CITRA KOTA PALU DALAM ARSIP

## PENDAHULUAN

### A. LATAR BELAKANG

**K**ota Palu adalah ibukota Provinsi Sulawesi Tengah. Kota ini berbatasan dengan Kabupaten Donggala di sebelah barat, Kabupaten Sigi-Biromaru di sebelah selatan dan utara, Kabupaten Parigi-Moutong di sebelah timur dan Selat Makassar di sebelah barat dan utara. Kota Palu merupakan kota lima dimensi yang terdiri atas lembah, lautan, sungai, pegunungan, dan teluk. Koordinatnya adalah 0,35 – 1,20 LU dan 120 – 122,90 BT. Kota Palu dilewati oleh garis Khatulistiwa, menjadikan Kota Palu sebagai salah satu kota tropis terkering di Indonesia dengan curah hujan kurang dari 1.000 mm per tahun.

Secara administratif, Kota Palu dibagi dalam 4 (empat) kecamatan dan 43 kelurahan. Kota Palu dengan wilayah seluas 395,06 kilometer persegi. Letak Kota Palu berbentuk memanjang dari timur ke barat terdiri dari dataran rendah, dataran bergelombang dan dataran tinggi. Dataran Kota Palu dikelilingi oleh pegunungan dan pantai. Peta ketinggian mencatat, 376,68 Km<sup>2</sup> (95,34%) wilayah Kota Palu berada pada ketinggian 100 - 500 mdpl dan hanya 18,38 Km<sup>2</sup> (46,66%) terletak di dataran yang lebih rendah. Masyarakat Kota Palu sangat heterogen. Penduduk yang menetap di kota ini berasal dari berbagai suku bangsa seperti Bugis, Toraja dan Mandar yang berasal dari Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat, Gorontalo, Manado, Jawa, Arab, Tionghoa, dan Kaili yang merupakan suku asli dan terbesar di Sulawesi Tengah.

## B. SEJARAH KOTA PALU

Kota Palu sekarang ini adalah bermula dari kesatuan empat kampung, yaitu: Besusu, Tanggabanggo (Siranindi) yang sekarang bernama Kamonji, Panggovia yang sekarang bernama Lere, dan Boyantongo yang sekarang bernama Kelurahan Baru. Mereka membentuk satu Dewan Adat disebut Patanggota. Salah satu tugasnya adalah memilih raja dan para pembantunya yang erat hubungannya dengan kegiatan kerajaan. Kerajaan Palu lama-kelamaan menjadi salah satu kerajaan yang dikenal dan sangat berpengaruh.

Sebelum Hindia Belanda datang ke wilayah Tanah Kaili (Donggala — Palu), maka bangsa Portugis telah lebih dahulu mengadakan hubungan dagang dengan raja-raja suku bangsa Kaili, yaitu kira-kira pada abad 16—16 Masehi. Kedatangan bangsa Portugis ke Tanah Kaili berlangsung secara damai dan melalui jalur perdagangan. Antara suku bangsa Kaili dengan bangsa Portugis saling membutuhkan secara timbal balik, saling tukar-menukar barang, sehingga hubungan antara kedua suku bangsa berlangsung secara aman dan damai. Bukti-bukti peninggalan bangsa Portugis di wilayah Tanah Kaili adalah berupa bentuk dan model pakaian. Sampai sekarang model dan bentuk pakaian yang mempunyai persamaan dengan pakaian Portugis masih dapat dijumpai pada masyarakat Kaili yang berdomisili di wilayah bekas kerajaan Kulawi (80 km dari Kota Palu sekarang). Selain itu wilayah Tanah Kaili telah mendapat kunjungan dari bangsa Melayu Tua dan menetap di beberapa daerah pedalaman. Mereka mengadakan perkawinan dengan penduduk asli. Sampai sekarang masih dapat ditandai keturunannya, yaitu mempunyai warna kulit lebih bersih dan selera makannyapun berbeda dengan selera makan penduduk asli. Kedatangan bangsa Melayu Tua tersebut di wilayah Tanah Kaili adalah ingin menjalin hubungan perdagangan dengan masyarakat suku bangsa Kaili, terutama di kalangan raja-raja.



### C. MASA PENJAJAHAN

Belanda pertama kali berkunjung ke Palu pada masa kepemimpinan Raja Maili (Mangge Risa) untuk mendapatkan perlindungan dari Manado di tahun 1868. Pada tahun 1888, Gubernur Belanda untuk Sulawesi bersama dengan bala tentara dan beberapa kapal tiba di Kerajaan Palu, mereka pun menyerang Kayumalue. Setelah peristiwa perang Kayumalue, Raja Maili terbunuh oleh pihak Belanda dan jenazahnya dibawa ke Palu. Setelah itu ia digantikan oleh Raja Jodjokodi, pada tanggal 1 Mei 1888 Raja Jodjokodi menandatangani perjanjian pendek dengan Pemerintah Hindia Belanda.

Selain itu Pemerintah Hindia Belanda juga mengadakan perjanjian dengan raja-raja lain. Kerajaan yang pertama-tama melakukan penanda tanganan perjanjian dengan Belanda adalah Kerajaan Donggala bernama Lassa Benawa Sanga Laa Daeng Palona tahun 1854 (*ANRI, Manado 66/2 L*), Kerajaan Parigi, yaitu pada tahun 1863 Kesepakatan Panjang (*Lange Kontrak*) dan tahun 1917 ditanda tangani pula Kesepakatan Singkat (*Korte Verklaring*).

Kemudian menyusul Kerajaan Banawa dengan *Lange Kontrak* pada tahun 1888 dan *Korte Verklaring* tahun 1904. Sesudah penanda tanganan perjanjian di Kerajaan Banawa, maka kerajaan-kerajaan lain di lembah Palu segera didatangi pula, seperti kerajaan Palu pada tahun 1888 (*Lange Kontrak*) dan tahun 1921 *Korte Verklaring*. Kemudian menyusul Kerajaan Tawaeli pada tahun 1888 (*Lange Kontrak*) dan tahun 1912 *Korte Verklaring*, Kerajaan-kerajaan Biromaru, Sigi dalam tahun 1891 *Lange Kontrak* dan 1980 *Korte Verklaring*, Kerajaan Moutong pada tahun 1896, Kerajaan Kulawi pada tahun 1908, dan *Korte Verklaring* dengan Tojo di Poso pada tahun 1916. (*ANRI, Besluit GG.15 Juli 1916 No 39*)

Dengan demikian dari tahun 1863 sampai dengan tahun 1908 kerajaan-kerajaan yang ada di Tanah Kaili praktis telah dikuasai oleh Hindia Belanda dengan cara penanda tanganan perjanjian, baik jangka panjang

maupun perjanjian jangka pendek. Sesudah diberlakukannya *Korte Verklaring* oleh Belanda, maka semakin terbataslah kekuasaan raja-raja di semua kerajaan Tanah Kaili dalam mengurus urusan rumah tangga kerajaan masing-masing. Sebaliknya semakin kuatlah kedudukan dan kekuasaan Hindia Belanda dalam melaksanakan misi perdagangannya yang bersifat monopoli serta politik yang bersifat mengadu domba. (ANRI, *KIT Sulawesi No 145/50*)

Setelah masa kerajaan telah ditaklukan oleh pemerintah Belanda, dibuatlah satu bentuk perjanjian *Lange Kontrak* yang akhirnya dirubah menjadi *Korte Verklaring* . Hingga ditetapkan daerah administratif berdasarkan Nomor 21 Tanggal 25 Februari 1940. Kota Palu termasuk dalam Afdeling Donggala yang kemudian dibagi lagi lebih kecil menjadi Onder Afdeling, antara lain Onder Afdeling Palu dengan ibu kotanya Palu, meliputi *Landschap* Palu yang mencakup distrik Palu Timur, Palu Tengah, dan Palu Barat; *Landschap* Kulawi; dan *Landschap* Sigi Dolo. (ANRI, *Kartografi Indonesia No. 2527/Blad 76-77*)

#### **D. MASA PERGERAKAN**

Masa Pergerakan Nasional di Palu ditandai dengan berdirinya organisasi Sarekat Islam (SI). SI berdiri di Lembah Palu pada tahun 1917 di bawah pimpinan Yoto Dg Pawindu DS mendapat sambutan dan simpati masyarakat. Melihat situasi tersebut, Pemerintah Belanda menganggap kehadiran SI sebagai ancaman yang berbahaya. Atas hasutan Belanda, Raja Palu saat itu yaitu Parampasi membentuk PRP atau Persatuan Raja Palu bersama aparatnya, yang oleh Belanda dijadikan sebagai tandingan SI. Namun pengaruh SI justru meluas hingga ke wilayah Kerajaan Dolo yang mendapat dukungan dari Raja Dolo Datu Pamusu .

Karena bergabung dengan SI, Raja Dolo Datu Pamusu, diturunkan dari tahtanya dan dibuang ke Ternate. Kemudian Yoto Dg Pawindu DS

dan Abd Rahim Pakamundi ditangkap Belanda dan dibuang ke Bandung dan mendekam di Penjara Sukamiskin selama 3 tahun. Yoto Dg Pawindu ditahan di Sukamiskin bersama Bung Karno sehingga kembalinya dari Sukamiskin, Yoto Dg Pawindu membentuk dan memimpin Partai Nasional Indonesia (PNI).

## E. MASA PENDUDUKAN JEPANG

Bertepatan pada tanggal 11 Januari 1942, Bala Tentara Jepang melakukan pendaratan pertama di wilayah Indonesia, dan pada waktu itu Manado sudah jatuh ke tangan Jepang. Dengan demikian di wilayah Sulawesi Tengah para penjajah Belanda memusatkan pasukannya di kedua tempat yakni Kota Palu dan Kota Poso. Kemudian pada bulan April 1942, pasukan Angkatan Laut Jepang tiba di Donggala dengan kapal penjelajah bersama beberapa kapal pemburu torpedo. Sebelum pendaratan dimulai, Pelabuhan Donggala dihujani bom sehingga bangunan sepanjang pantai hancur rata dengan tanah. Setelah itu tentara Jepang mendarat dan langsung mencari pejabat-pejabat pemerintah Belanda, tetapi ternyata Asisten Residen Donggala De La Vuento dan Penguasa (*Gezaghebber*) Palu Feliks bersama keluarganya telah menyingkir. Dengan demikian hanyalah raja-raja setempat yang ditemukan oleh tentara Jepang.

Setelah kota Donggala dikuasai oleh Jepang, mereka melanjutkan perjalanan dan mendarat di Palu bersama 30 orang angkatan laut. Di Kota Palu, Jepang menemukan tentara Belanda yang sudah menyerah dan langsung diadakan serah terima kekuasaan dari Belanda dan Jepang, sesudah serah terima kekuasaan dilakukan maka para bekas KNIL yang ditemukan, sebahagian dijadikan polisi Jepang (Jompo), sebahagian diizinkan hidup secara sipil sebagai tahanan kota dan sebahagian lainnya menjadi petani. Kecuali orang-orang Belanda/Indo Belanda, diangkut ke Manado untuk menjadi tahanan.

Tidak lama setelah pendaratan pasukan *Kaigun* Jepang di Donggala dan Palu, Kepala Polisi Kaisar Suco dari Makassar tiba di Donggala yang bertindak mewakili Pemerintah Jepang menyerahkan urusan pemerintahan kepada raja-raja setempat. Situasi pemerintahan yang dikendalikan oleh para raja setempat berlangsung sampai bulan Juni 1942. Setelah itu petugas-petugas pemerintahan sipil Jepang dari Manado datang.

Pada masa Jepang, Kota Donggala merupakan kedudukan Jepang yang berpangkat *Ken Kanrikan*, yang membawahi tiga tempat *bunken kanrikan* yaitu Donggala, Palu dan Parigi. Sedangkan *bunken kanrikan* Donggala membawahi dua daerah kerajaan yaitu Banawa dan Tawaeli. Kemudian *bunken kanrikan* Palu membawahi tiga daerah kerajaan yaitu Palu, Sigi, Dolo, dan Kulawi. Adapun *bunken kanrikan* Parigi membawahi dua daerah kerajaan yaitu Parigi dan Moutong. Selama pendudukan Jepang di Kota Donggala dan Palu, peranan raja-raja hanya sekedar pembantu pemerintah Jepang. Para raja diperalat untuk mengerahkan tenaga rakyat untuk bekerja demi kepentingan penyediaan perbekalan perang.

## **F. MASA REPUBLIK INDONESIA**

Pertumbuhan Kota Palu setelah kemerdekaan semakin lama semakin meningkat. Dimana hasrat masyarakat untuk lebih maju dari masa penjajahan dengan tekad membangun masing-masing daerahnya. Berkat usaha makin tersusun roda pemerintahannya dari pusat sampai ke daerah-daerah. Maka terbentuklah daerah Swatantra tingkat II Donggala sesuai peraturan pemerintah Nomor 23 Tahun 1952. Kota Palu kemudian mulai berkembang setelah dibentuknya Residen Koordinator Sulawesi Tengah Tahun 1957 yang menempatkan Kota Palu sebagai Ibukota Keresidenan. Saat tahun 1964, terbentuk Propinsi Sulawesi Tengah berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964, status Kota Palu



sebagai ibukota ditingkatkan menjadi Ibukota Propinsi Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah.

Atas dasar keputusan tersebut maka diambil langkah-langkah positif oleh Pemerintah Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah dan Pemerintah Dati II Donggala guna mempersiapkan segala sesuatu yang ada kaitannya dengan kemungkinan Kota Palu sebagai Kota Administratif. Usaha ini diperkuat dengan SK Gubernur KDH Tingkat I Sulteng Nomor 225/Ditpem/1974 dengan membentuk Panitia Peneliti kemungkinan Kota Palu dijadikan Kota Administratif, maka pemerintah pusat telah berkenan menyetujui Kota Palu dijadikan Kota Administratif dengan dua kecamatan yaitu Palu Barat dan Palu Timur.

Dasar hukum pembentukan wilayah Kota Administratif Palu yang dibentuk tanggal 27 September 1978 atas Dasar Asas Dekonsentrasi sesuai Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah. Kota Palu sebagai Ibukota Propinsi Dati I Sulawesi Tengah sekaligus ibukota Kabupaten Dati II Donggala dan juga sebagai ibukota pemerintahan wilayah Kota Administratif Palu. Palu merupakan kota kesepuluh yang ditetapkan pemerintah menjadi kota administratif. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tanggal 12 Oktober 1994, Menteri Dalam Negeri Yogi S. Memet meresmikannya Kotamadya Palu dan melantik Rully Lamadjido, SH sebagai walikotanya.

## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU

\_\_\_\_\_,(1975), Encyclopedie Nederlandsch Indie,Leiden: EJ Brill.

\_\_\_\_\_,Historische Geografische Woordenboek, Leiden: D Northheven van Goor.

Mamar, Sulaiman dkk ,(1975), Sejarah Sosial Sulawesi Tengah, Jakarta: Depdikbud.

Nasution, A.H. (1978). Sekitar Perang Kemerdekaan Indonesia. Jilid II. Bandung: Angkasa.

Poesponegoro, Marwati D. dan Nugroho Notokusanto (2007). Sejarah Nasional Indonesia I Edisi Pemutakhiran. Jakarta: Balai Pustaka

Yayasan Bhakti Wawasan Nusantara (1992). Profil Provinsi Republik Indonesia: Sulawesi Tengah. Jakarta: Yayasan Bhakti Nusantara

### SITUS WEB

[www.sulteng.go.id](http://www.sulteng.go.id)

[www.palukota.go.id](http://www.palukota.go.id)

The image features a close-up of a hand holding a pen, poised to write on a map. The map is a topographical or road map of Palu, Sulawesi, with various lines and text. The title 'CITRA KOTA PALU DALAM ARSIP' is prominently displayed in the center in a bold, green, outlined font. The background is a soft, warm-toned blur of the map and the hand.

**CITRA  
KOTA PALU  
DALAM ARSIP**



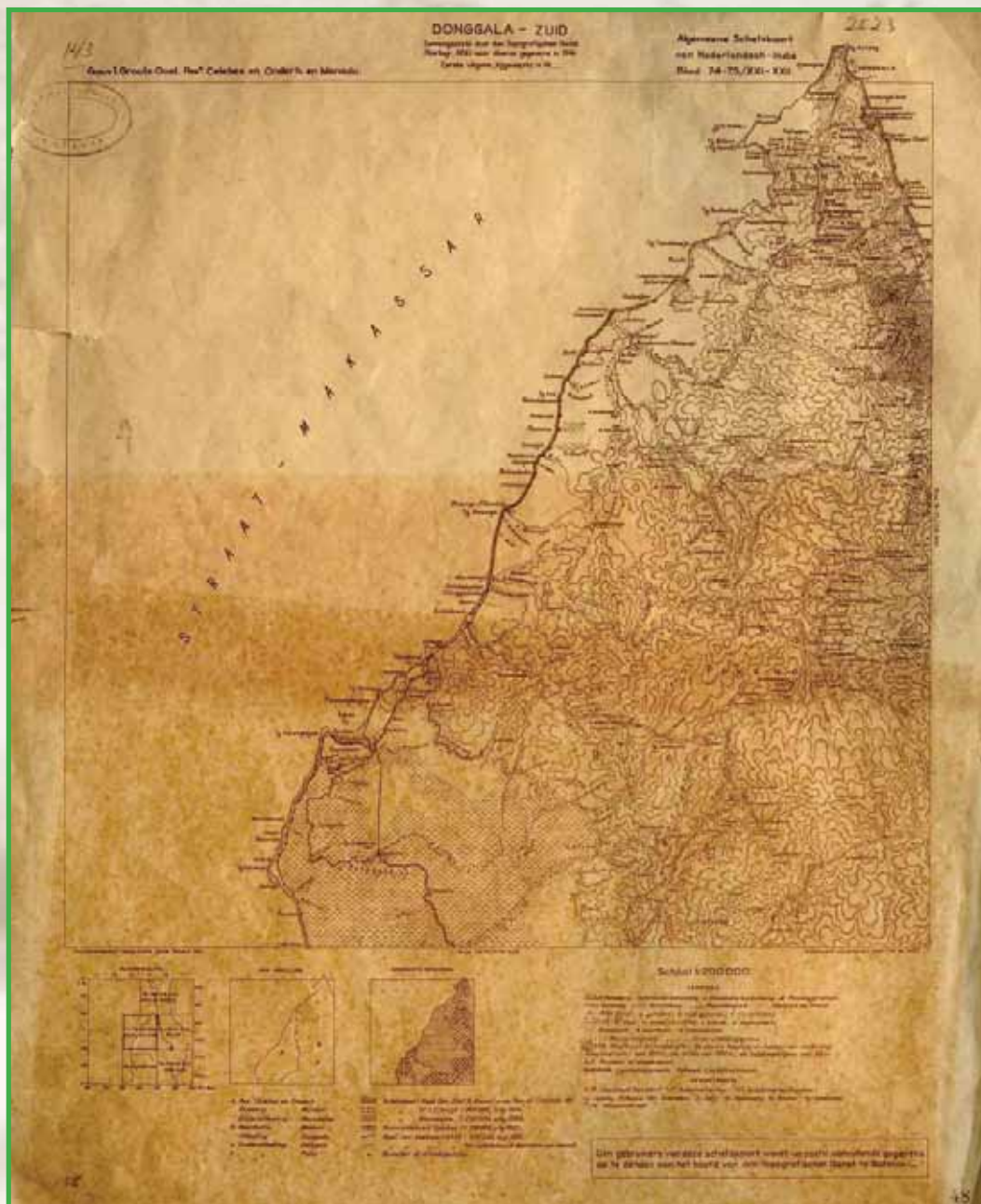




Peta Paloe (Palu),  
1941.

*Sumber: ANRI, Kartografi Indonesia No.2527/Blad 76-77,  
Batavia 1941*





Peta Donggala-Zuid (Donggala Selatan)  
1941

*Sumber: ANRI, Kartografi Indonesia No.2523/Blad 74-75,  
Batavia 1941*



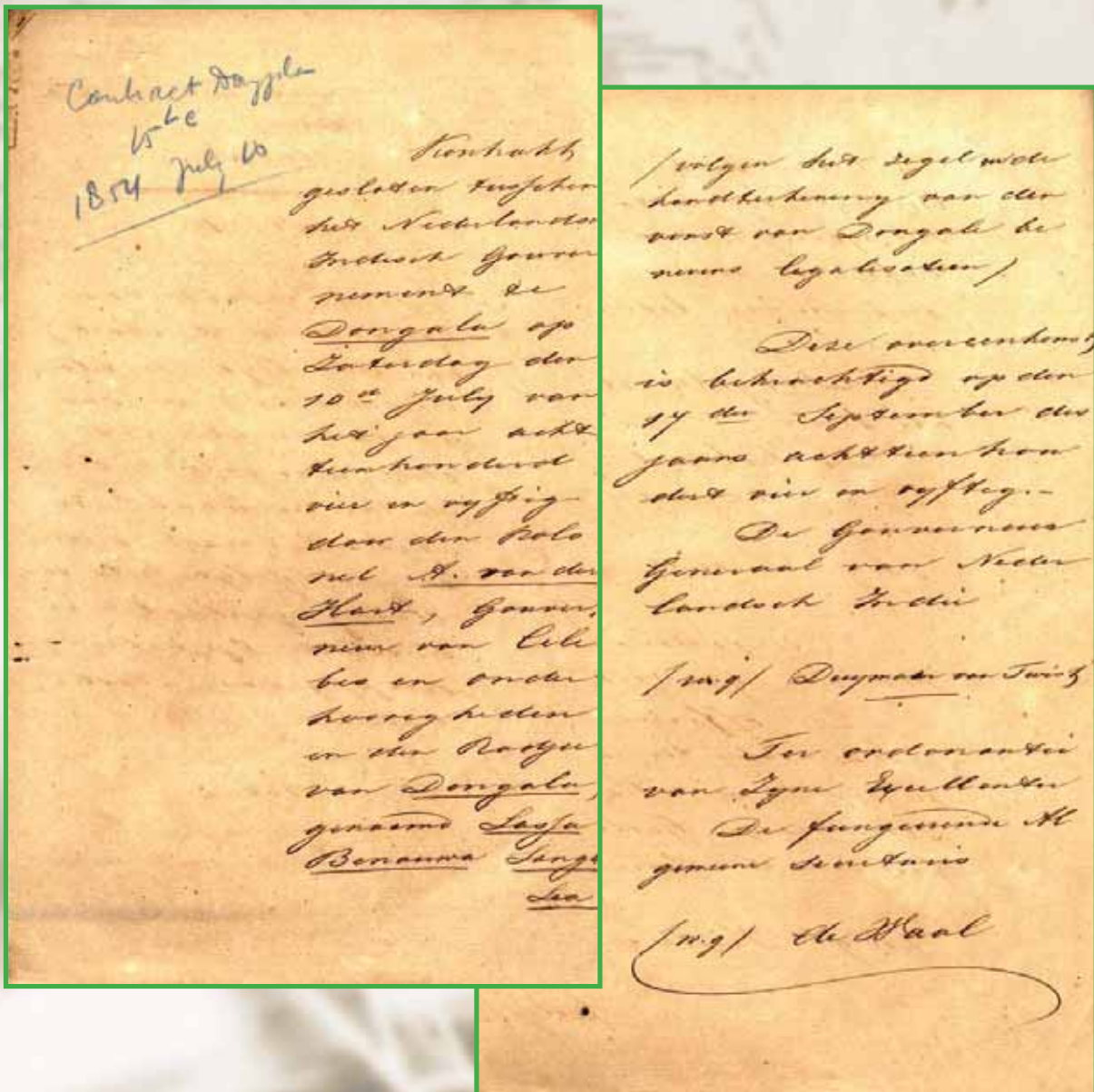


**POLITIK  
DAN  
PEMERINTAHAN**

Di masa Pemerintahan Kolonial Hindia Belanda, penguasaan atas daerah seringkali diperkuat dengan adanya Kontrak Perjanjian dengan Pemerintahan (Raja) daerah setempat, dalam hal ini Palu yang berada di bawah bagian (onderafdeling) Donggala, mengikuti apa yang disepakati oleh Raja Donggala, Lassa Benawa Sanga Laa Daeng Palona di tahun 1854

Batas daerah dan kekuasaan pemerintahan pun di tandai dengan Surat Keputusan Gubernur Jenderal (Besluiten) yang sangat mengikat.

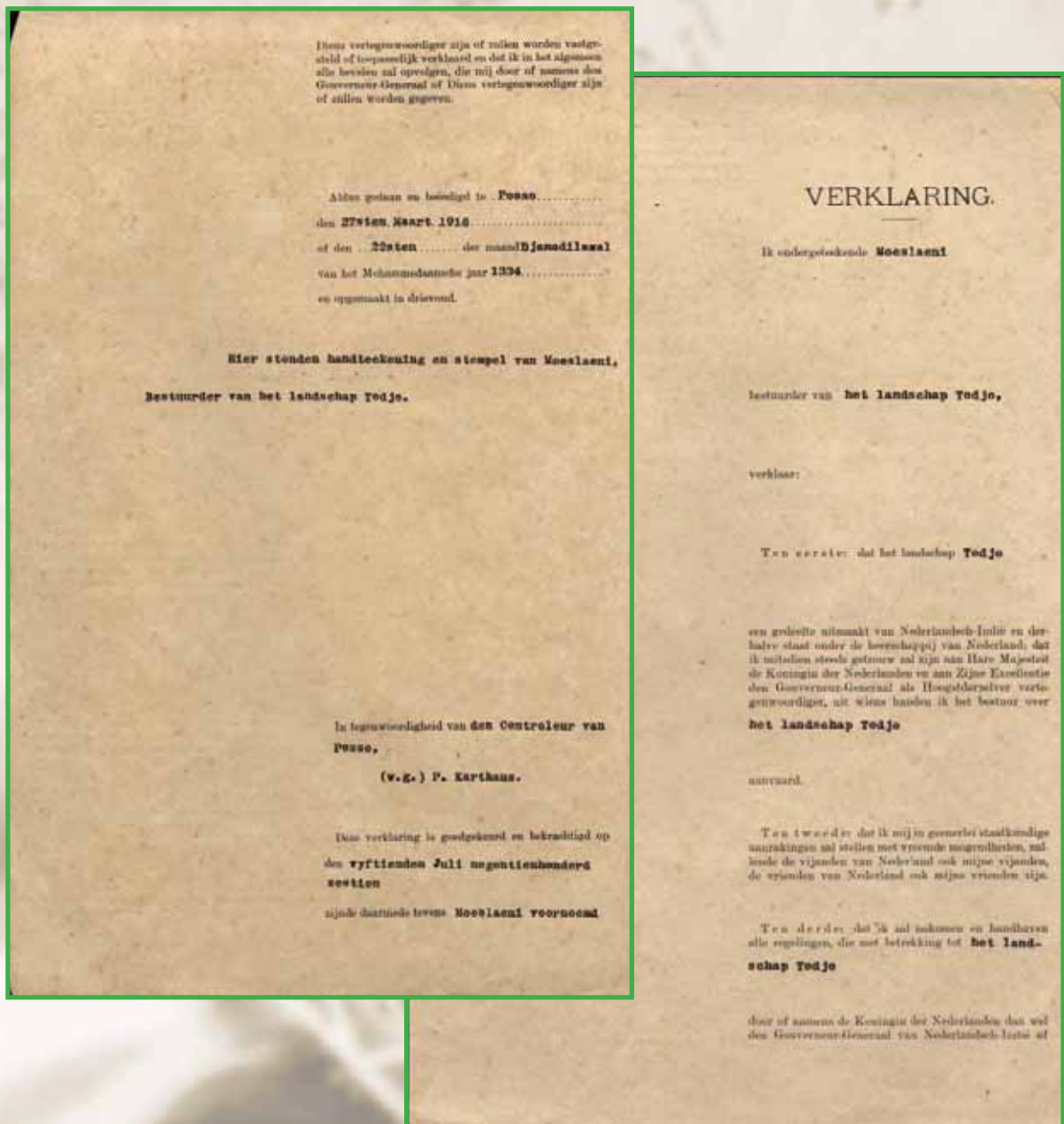
Setelah masa kemerdekaan beberapa peristiwa seperti PERMESTA, sangat mengganggu keberlangsungan pemerintahan setempat. Kunjungan Komandan Operasi ke Palu menunjukkan betapa pentingnya stabilitas keamanan setempat.



Salinan Kontrak Perjanjian antara Pemerintah Hindia Belanda dengan Raja Donggala, bernama Lassa Benawa Sanga Laa Daeng Palona, tanggal 17 September 1854, terdiri dari 21 pasal.

*Sumber: ANRI, Manado 66/2 L*



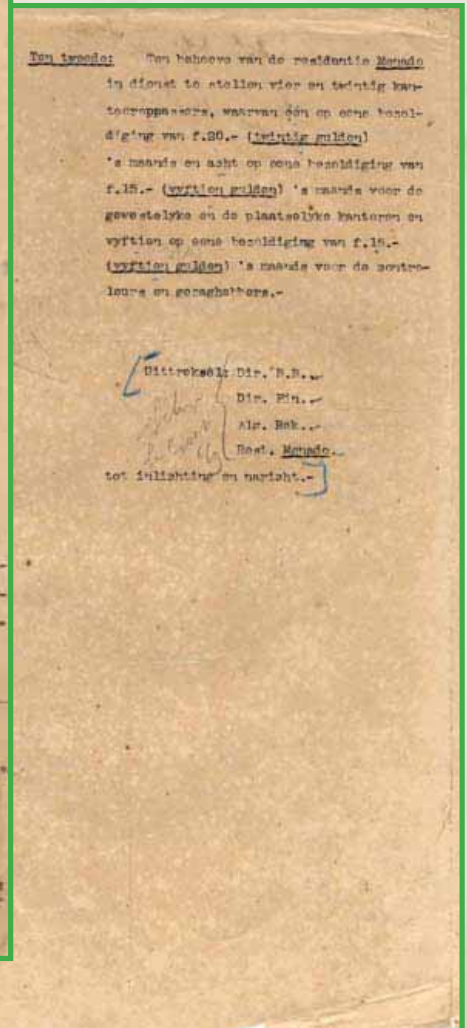
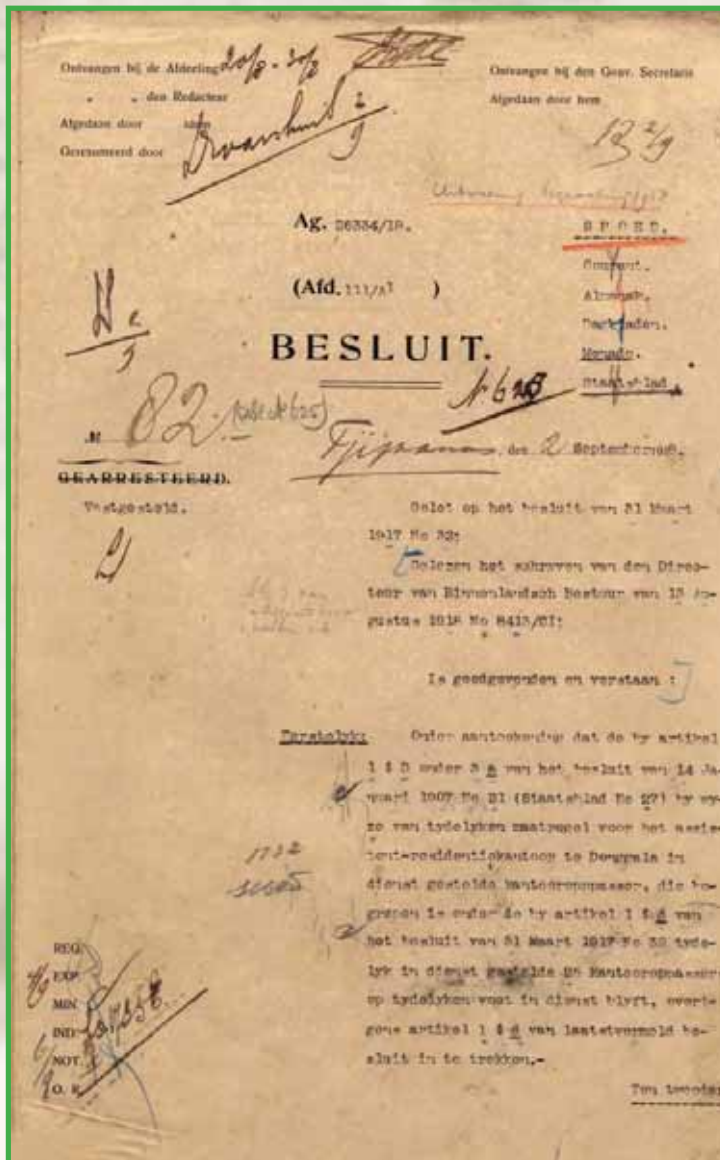


*Korte Verklaring* (Plakat Pendek) antara Moeslaeni, Kepala Daerah Tojo, di Poso, dengan Pemerintah Hindia Belanda, 15 Juli 1916.

*Sumber: ANRI, Besluit 15 Juli 1916 No. 39*

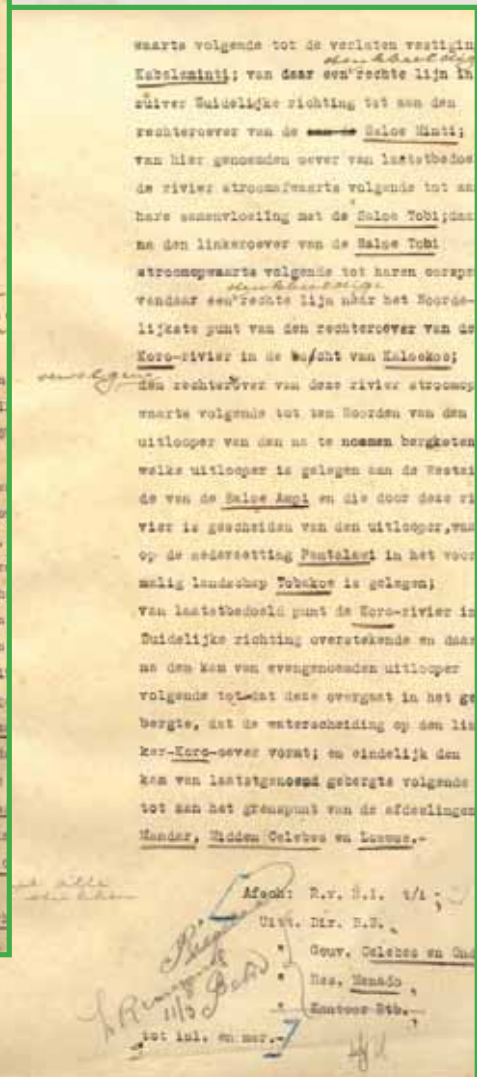
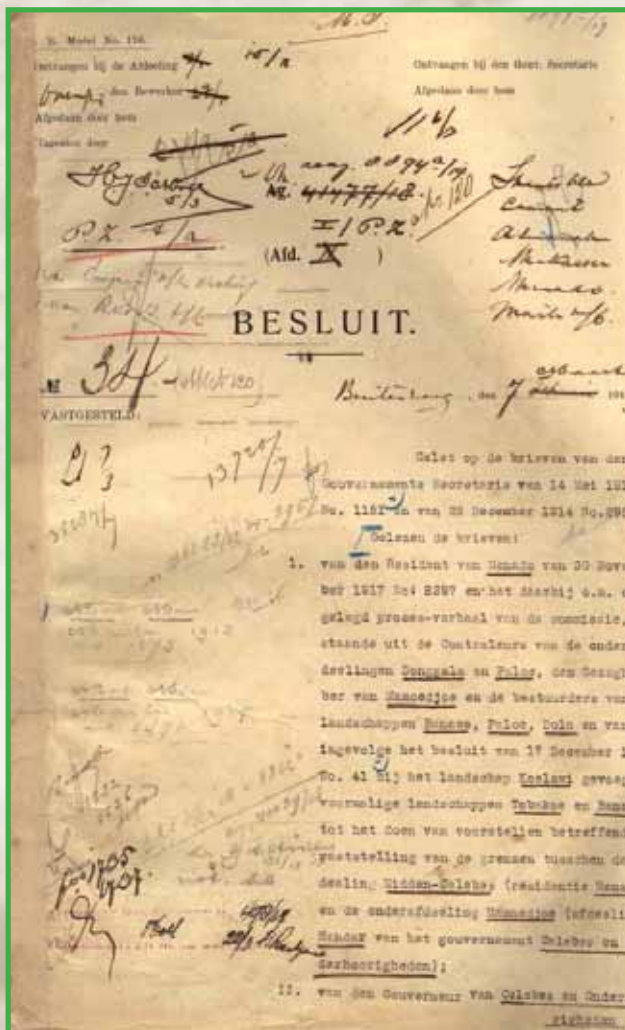






Surat Keputusan mengenai besarnya gaji pesuruh di Kantor Asisten Residen Donggala, 2 September 1918.  
Sumber: ANRI, Besluit 2 September 1918 No. 82





Surat Keputusan tentang garis batas antara daerah Sulawesi Tengah dan daerah Mamuju berdasarkan usul dari Wentholt (Gubernur Sulawesi dan daerah sekitarnya) dengan proses verbal yang ditandatangani oleh kontrolir Donggala, Raja Banawa, Kontrolir Palu, Raja Palo, Raja Dolo, Raja Tobaku, Raja Banao, 7 Maret 1919.  
 Sumber: ANRI, Besluit 7 Maret 1919 No. 34



Para pejabat di Palu, Sulawesi Tengah,  
1920.

*Sumber: ANRI, KIT Sulawesi No. 145/50*





Menteri Hardi meninggalkan Palu, sedang memeriksa barisan kehormatan, 12 Oktober 1958

*Sumber: ANRI, Kempen 581012 TT 11*



Menteri Hardi sedang melihat dan memeriksa senjata bekas rampasan dari Permesta di Palu, Sulawesi Utara, 12 Oktober 1958

*Sumber: ANRI, Kempen 581012 TT 49*



Menteri Hardi meninjau asrama polisi di Palu Sulawesi Utara,  
12 Oktober 1958

*Sumber: ANRI, Kempen 581012 TT 51*





Menteri Hardi selesai memimpin rapat kerja di Palu, 12 Oktober  
1958

*Sumber: ANRI, Kempen Sulut 581012 TT 9*





Overste Roekminto bertanya jawab dengan para tawanan  
Permesta di Palu,  
8 April 1958.

*Sumber: ANRI, Kempen 580408 SS 26*



Komandan Operasi Insjaf, Overste Roekminto,  
meninjau rumah penjara Palu,  
8 April 1958.

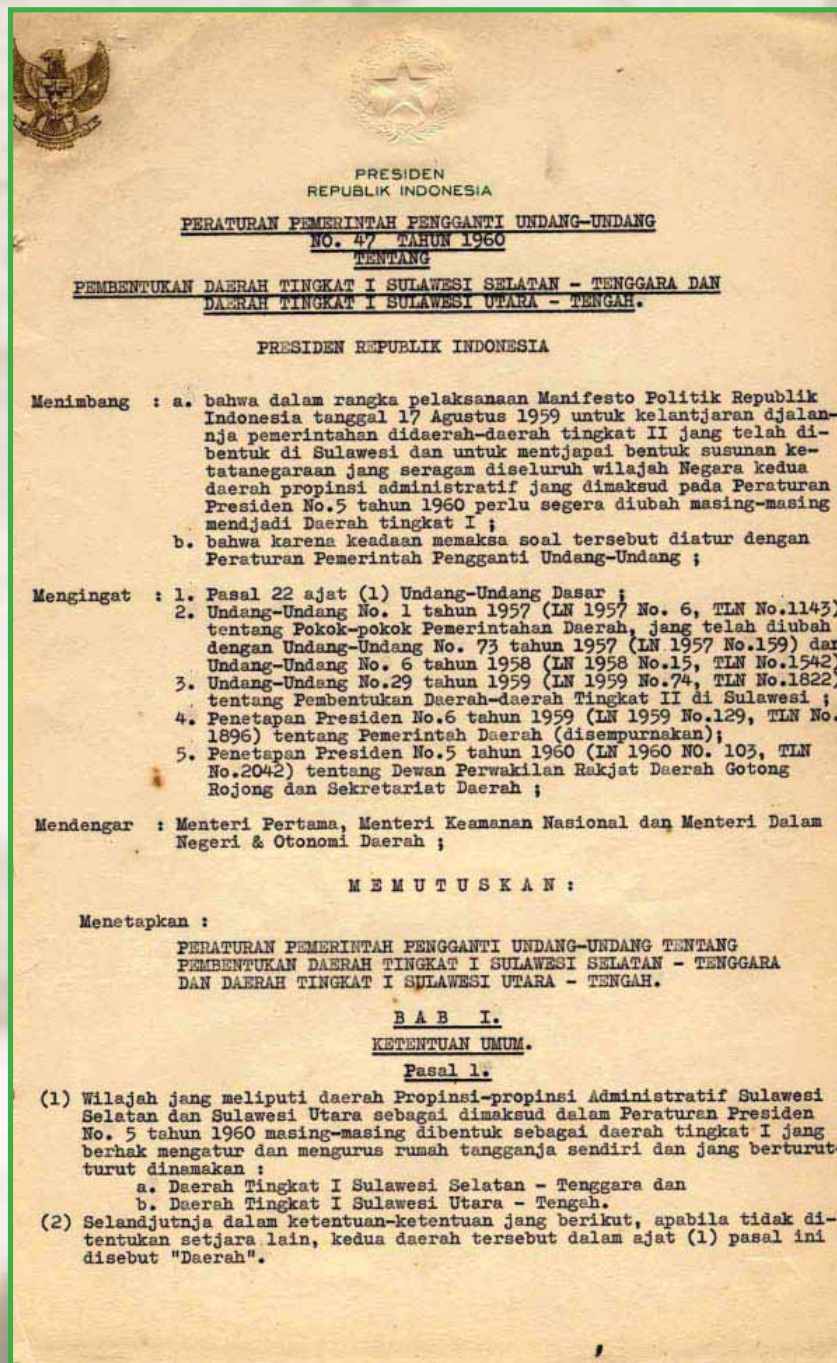
*Sumber: ANRI, Kempen 580408 SS 20*





Anggota-anggota Pemuda Revolusioner dari Permesta  
yang ditawan di penjara Palu,  
8 April 1958.

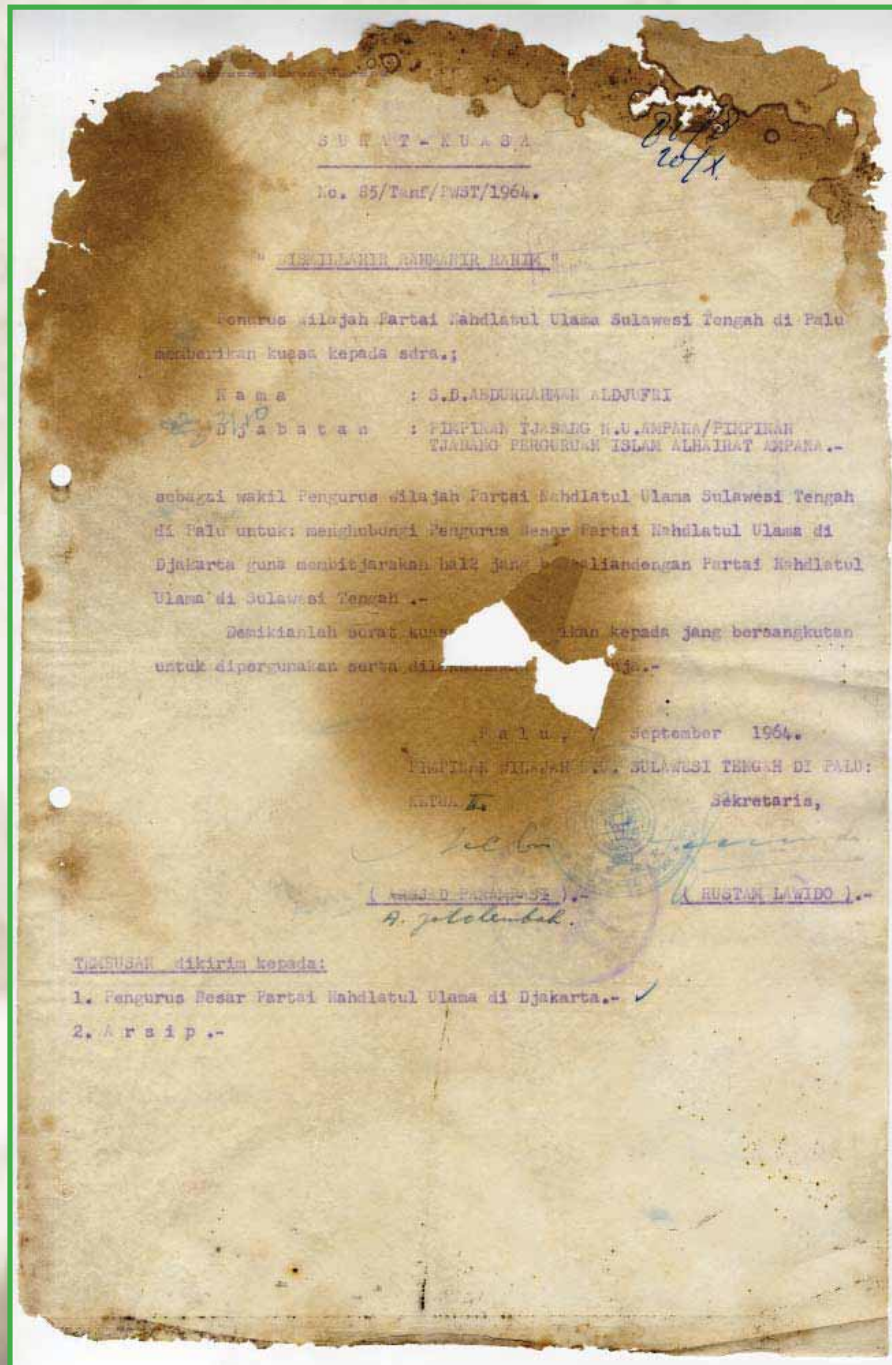
*Sumber: ANRI, Kempen 580408 SS 32*



Peraturan Pemerintah Pengganti UU (PERPU) No. 47 tahun 1960 tentang pembentukan daerah TK. I Sulawesi Selatan – Tenggara dan daerah TK. I Sulawesi Utara – Tengah, 13 Desember 1960.

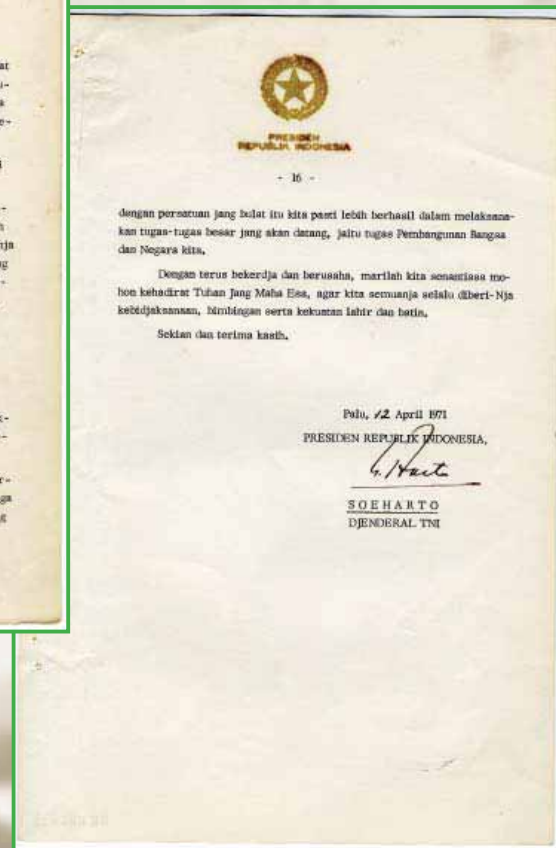
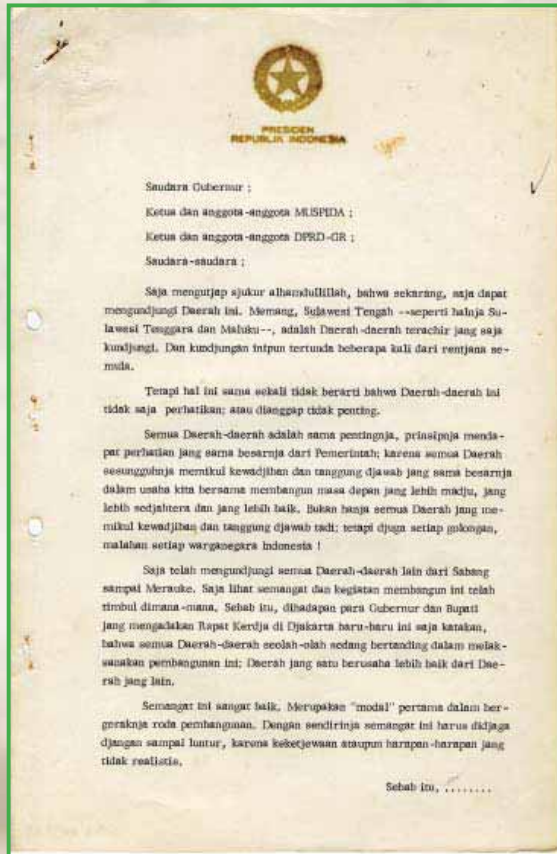
*Sumber: ANRI, Sekkab. Perpu No. 77*





Surat Kuasa kepada S.D. Abdurrahman Aldjufri sebagai pengurus wilayah Partai Nahdatul Ulama Sulawesi Tengah di Palu, 7 September 1964.

*Sumber: ANRI, Nahdatul Ulama No. 472*



Naskah pidato pada kunjungan kerja ke Palu, Sulawesi Tengah,  
12 April 1971.

*Sumber: ANRI, Pidato Presiden Soeharto 1966-1998 No. 458*



**PEMBENTUKAN KOTA ADMINISTRATIF PALU**  
**Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1978 Tanggal 1 Juli 1978**

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

- a. bahwa berhubung dengan perkembangan dan kemajuan di wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah pada umumnya dan wilayah Kecamatan Palu pada khususnya, dipandang perlu untuk mengatur penyelenggaraan pemerintahan wilayah secara khusus guna menjamin terpenuhinya tuntutan perkembangan dan kemajuan dimaksud sesuai dengan aspirasi masyarakat di, wilayah Kecamatan Palu;
- b. bahwa perkembangan dan kemajuan wilayah Kecamatan Palu telah menunjukkan ciri dan sifat penghidupan perkotaan yang memerlukan pembinaan serta pengaturan penyelenggaraan pemerintahannya secara khusus;
- c. bahwa sesuai dengan ketentuan tersebut dalam Pasal 72 ayat (4) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Di Daerah, pembentukan Kota Administratif Palu perlu ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah;

Mengingat :

1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945;
2. Undang-undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1822);
3. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara dengan mengubah Undang-undang, Nomor 47 Prp. Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara-Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan-Tenggara (Lembaran Negara Tahun 1964 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2687);
4. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3037);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PEMBENTUKAN KOTA  
ADMINISTRATIF PALU.

**BAB I**  
**KETENTUAN UMUM**  
**Pasal 1**

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan :

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1978 tentang  
Pembentukan Kota Administratif Palu, 1978.  
*Sumber: ANRI, Peraturan Perundang-undangan jenis:  
UU, PP, Keppres, Inpres 1976-1985 No. 18*

**UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA**  
**NOMOR 4 TAHUN 1994**  
**TENTANG**  
**PEMBENTUKAN KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II PALU**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang:

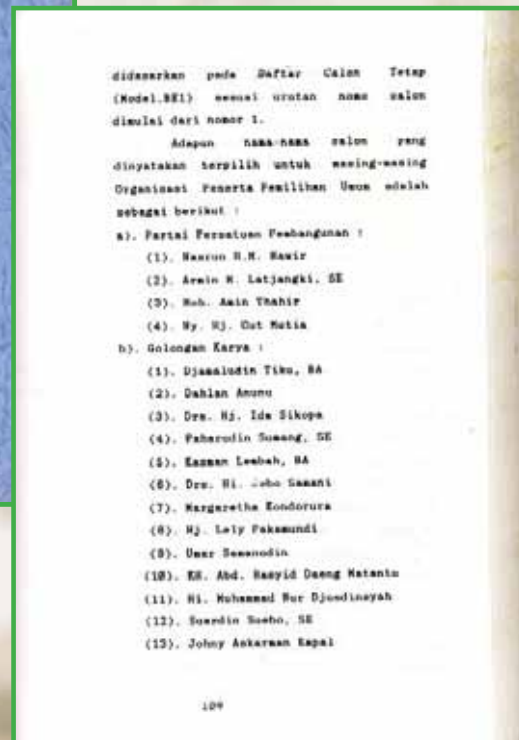
- a. bahwa berhubung dengan perkembangan dan kemajuan Propinsi Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah dan Kabupaten Daerah Tingkat II Donggala pada umumnya serta Kota Administratif Palu pada khususnya, dipandang perlu untuk meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, dan pembinaan kemasyarakatan guna menjamin terpenuhinya tuntutan perkembangan dan kemajuan dimaksud di masa mendatang;
- b. bahwa Kota Administratif Palu dalam perkembangannya telah menunjukkan kemajuan-kemajuan di berbagai bidang sesuai dengan peranan dan fungsinya, sehingga perlu diikuti dengan peningkatan dan pengembangan sarana dan prasarana pengelolaan wilayah tersebut;
- c. bahwa perkembangan dan kemajuan tersebut bukan saja memberikan dampak berupa kebutuhan peningkatan pelayanan di bidang pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan, tetapi juga memberikan gambaran mengenai dukungan kemampuan dan potensi wilayahnya untuk menyelenggarakan otonomi daerah;
- d. bahwa untuk lebih meningkatkan daya guna dan hasil guna penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat, dipandang perlu Kota Administratif Palu dibentuk menjadi Kotamadya Daerah Tingkat II;
- e. bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Di Daerah, maka pembentukan Kota Administratif Palu menjadi Kotamadya Daerah Tingkat II harus ditetapkan dengan Undang-undang.

Mengingat:

1. Pasal 5 ayat (1), Pasal 18, dan Pasal 20 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;
2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3037);
3. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara dengan mengubah Undang-undang Nomor 47 Prp. tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara - Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 7) menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2687);
4. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1969 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1994  
tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Palu, 1994.

*Sumber: ANRI, Peraturan Perundang-undangan jenis:  
Undang-Undang RI Tahun 1986-1995 No. 4*



Laporan Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 1997  
Kotamadya Daerah Tingkat II Palu, 1997.  
*Sumber: ANRI, Komisi Pemilihan Umum 1971-1999 No. 944.1*

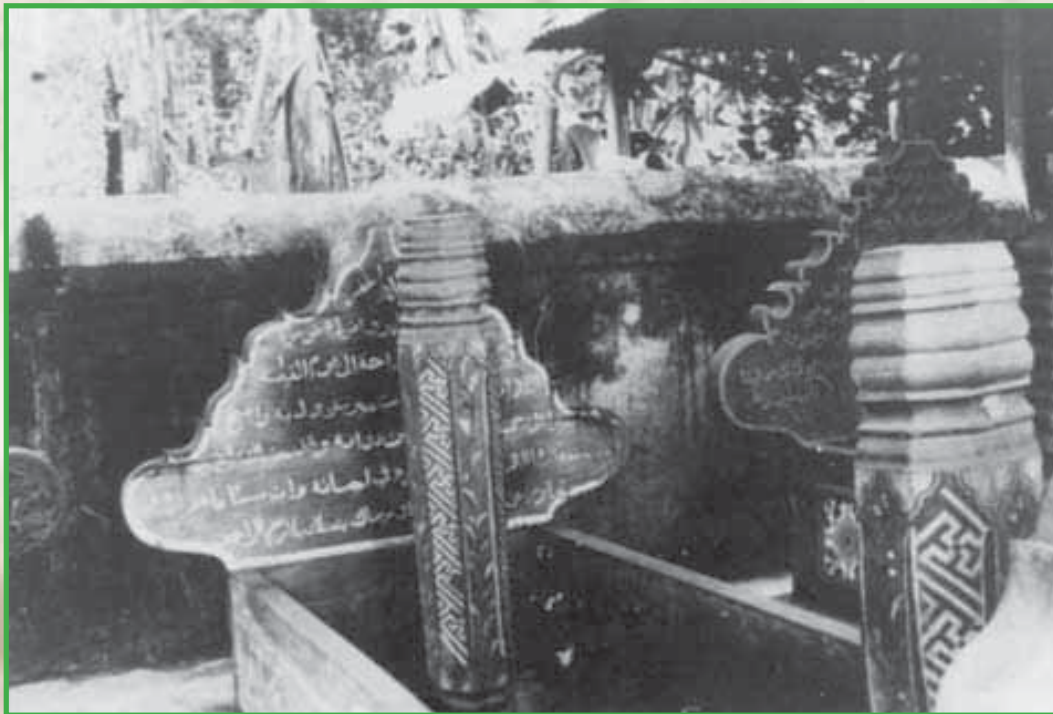




# KEAGAMAAN

Pemakaman Raja Gowa terakhir di areal Masjid di Donggala, menandakan kehidupan keagamaan di Palu yang begitu pluralistik kesukuan.

Dinamika berkembangnya kelompok sosial masyarakat berbasis agama pada masa awal kemerdekaan, begitu cepat, salah satunya dengan adanya Ketetapan berdirinya Muhammadiyah Cabang Palu 28 Desember 1959 dan Kepengurusan Ikatan Pengurus Besar Alchairat, 8 September 1964.

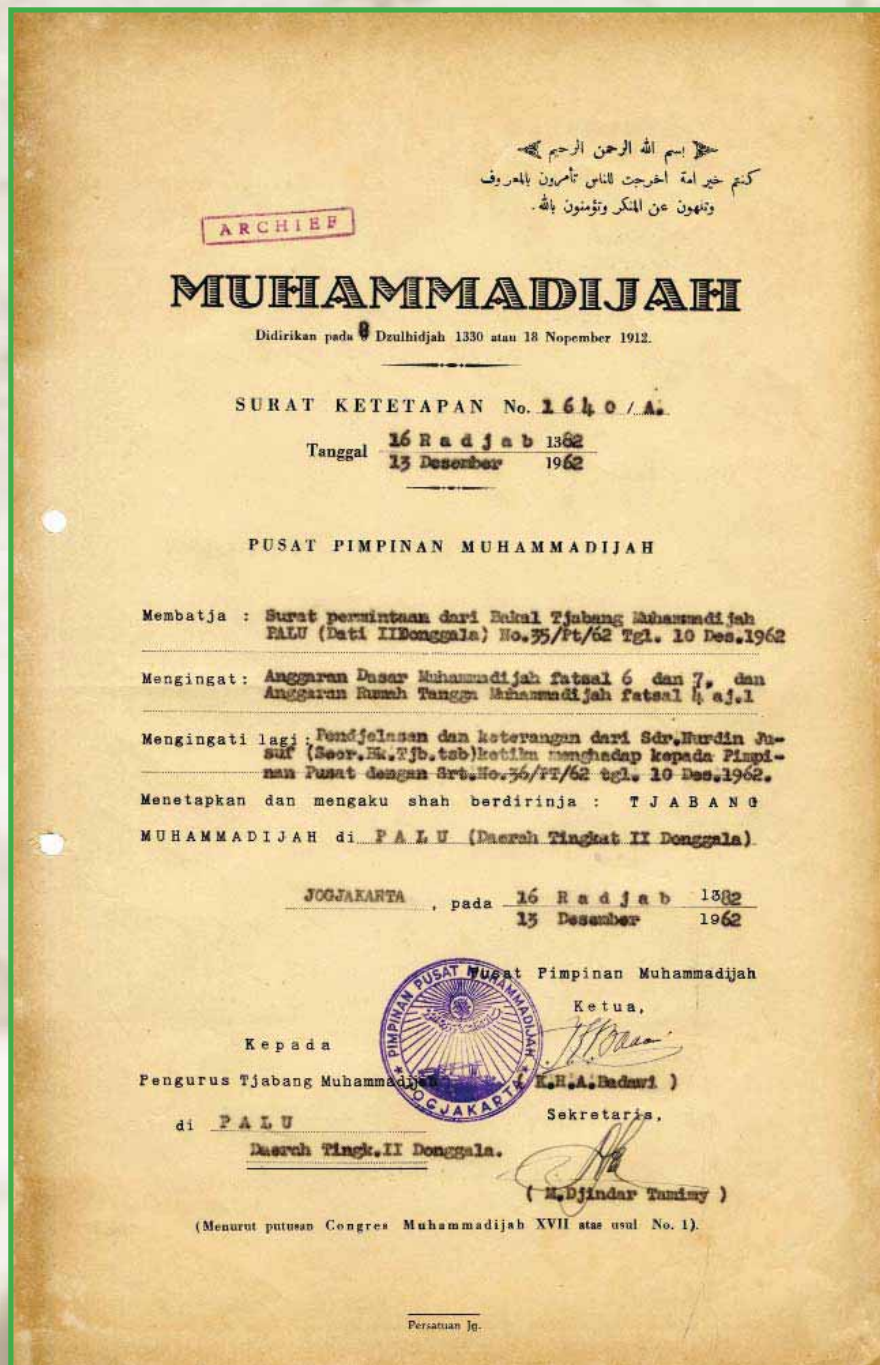


Nisan dan makam Raja Gowa terakhir  
di areal Masjid Donggala,  
1920.

*Sumber: ANRI, KIT Sulawesi No. 815/62*



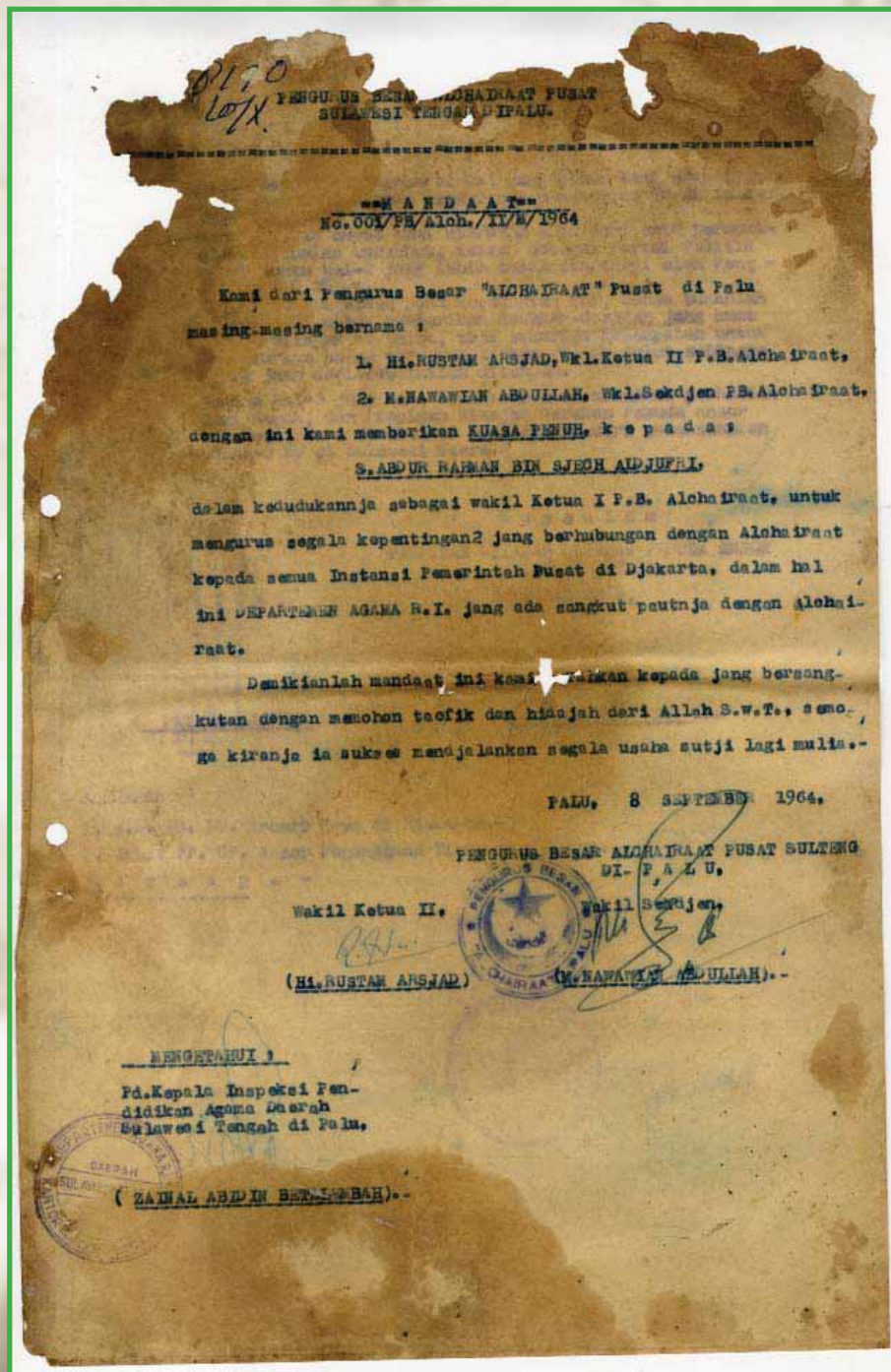




Surat Keputusan mengenai pengesahan berdirinya Cabang Muhammadiyah Daerah Tingkat II Donggala, Palu, 1962.

*Sumber: ANRI, PP Muhammadiyah Yogyakarta No. 2087*

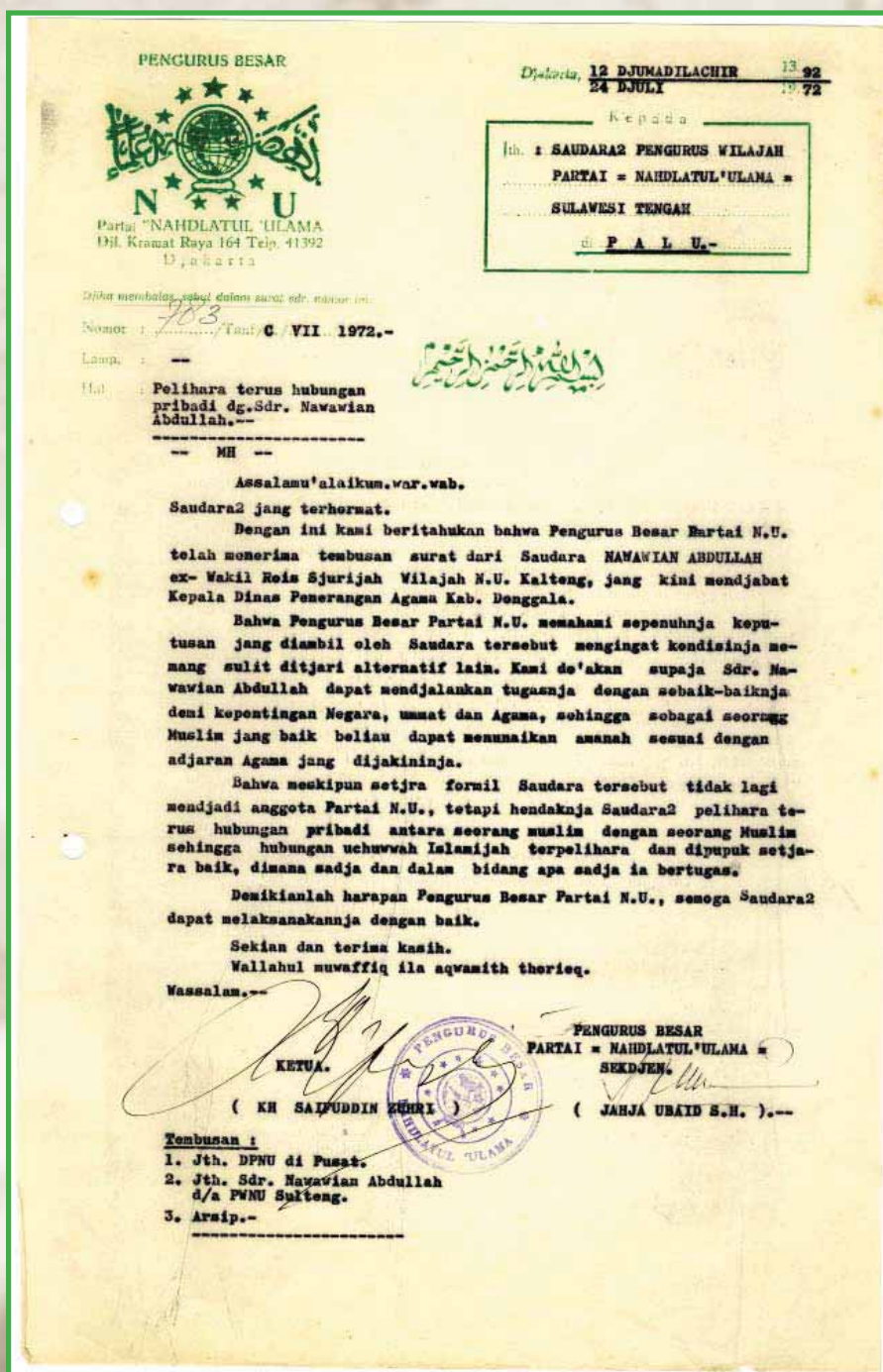




Mandat dari pengurus besar "Alchhairat" Pusat di Palu kepada  
S. Abdur Rahman Bin Sjech Aidjufri sebagai wakil ketua IP.B.  
Alchhairaat, 8 September 1964.

*Sumber: ANRI, Nahdatul Ulama No. 473*





Surat dari Pengurus Besar Nahdatul Ulama kepada Pengurus Nahdatul Ulama wilayah Palu untuk menjaga hubungan baik dengan Nawawian Abdullah, mantan Wakil Rois Syuriah Wilayah Nahdatul Ulama Kalimantan Tengah, 1972  
*Sumber: ANRI, Nahdatul Ulama No. 619*

Lampiran. H. 202. 14.

USUL PROYEK PEMBINAAN WARGA GEREJA  
SYNODE GEREJA PROTESTAN INDONESIA  
DI DONGGALA (GPID)

---

1. Latar belakang.

Synode GPID yang berkedudukan di kota Palu ibu kota Propinsi Sulawesi Tengah dengan wilayah pelayanan Kabupaten Donggala merupakan salah satu Gereja yang muda, diresmikan pada tanggal 4 April 1965 dan menjadi anggota DGI pada tahun 1971. Gereja ini tumbuh dan berkembang dari hasil pelayan/pekabaran Injil Synode GMIN. Bertahun-tahun sebelumnya pekabaran-pekabaran Injil dari Synode GMIN datang hanya untuk melayani Jemaat-jemaat berasal dari Minahasa dan Sangir Talud yang bekerja di daerah ini.

Lama-kelamaan pekabaran-pekabaran Injil ini mulai memasuki pedalaman-pedalaman dan berhasil membaptiskan dan membentuk Jemaat dari penduduk lokal.

Jemaat-jemaat ini kemudian diperkembangkan dan beberapa pemuda di antaranya dikirim untuk mengikuti pendidikan Teologia di Tomohon dan mereka inilah yang melanjutkan pelayanan di Kabupaten Donggala.

Tiga tahun perwujudan sesudah Synode GPID diresmikan pelayanan di GPID masih dilakukan oleh Pendeta-pendeta dari GMIN. Setelah 3 tahun ini selesai maka Pendeta-pendeta ini ditarik oleh GMIN kemudian mengalihkan pelayanan kepada Pendeta-pendeta setempat. Panggilan ini sebenarnya merupakan beban berat bagi Synode GPID karena menghadapi situasi Jemaat yang masih sangat terkebelakang, adanya transmigrasi dari Bali dan imigrasi penduduk dari daerah lain serta masih adanya kelompok-kelompok suku yang hidup terasing di pedalaman dan belum sempat dijangkau oleh pelayanan umum di samping menghadapi keterbatasan sarana pembangunan di daerah tersebut.

Selain kesulitan-kesulitan tersebut kini GPID mulai menghadapi akibat dari arus kemajuan di kota yang mulai menimbulkan masalah terutama di kalangan generasi muda berupa pengangguran dan kenakalan remaja. Kesulitan-kesulitan ini tidak dapat diibangi oleh perlengkapan GPID berupa Pendeta-pendeta/guru Injil Klasik-klasik yang selain pengetahuan Teologinya terbatas juga kurang mampu membawa pembaharuan atau menimbulkan partisipasi Jemaat baik dalam pelayanan Gereja maupun pembangunan.

Usulan proyek pembinaan warga Gereja Synode Gereja  
Protestan Indonesia di Donggala,  
September 1979.

*Sumber: ANRI, Depag No.092*



## UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 3 TAHUN 1995

## TENTANG

PEMBENTUKAN PENGADILAN TINGGI AGAMA DI BENGKULU, DI PALU, DI KENDARI, DAN DI KUPANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang:

- a. bahwa dalam rangka pemerataan kesempatan untuk memperoleh keadilan dan peningkatan pelayanan hukum kepada masyarakat serta demi tercapainya penyelesaian perkara dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan, perlu dibentuk Pengadilan Tinggi Agama di ibukota propinsi;
- b. bahwa daerah hukum Pengadilan Tinggi Agama Palembang yang meliputi wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Sumatera Selatan dan Bengkulu, Pengadilan Tinggi Agama Manado yang meliputi wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Sulawesi Utara dan Sulawesi Tengah, Pengadilan Tinggi Agama Ujung Pandang yang meliputi wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan dan Sulawesi Tenggara, serta Pengadilan Tinggi Agama Mataram yang meliputi wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, dan Timor Timur dipandang terlalu luas;
- c. bahwa pembentukan Pengadilan Tinggi Agama ditetapkan dengan Undang-undang;
- d. bahwa sehubungan dengan pertimbangan tersebut, dipandang perlu membentuk Pengadilan Tinggi Agama, masing-masing di Bengkulu, di Palu, di Kendari, dan di Kupang.

Mengingat:

1. Pasal 5 ayat (1), Pasal 20 ayat (1), dan Pasal 24 Undang-Undang Dasar 1945;
2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Tahun 1970 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2951);
3. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3316);
4. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama (Lembaran Negara Tahun 1989 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3400).

Dengan Persetujuan:

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA;

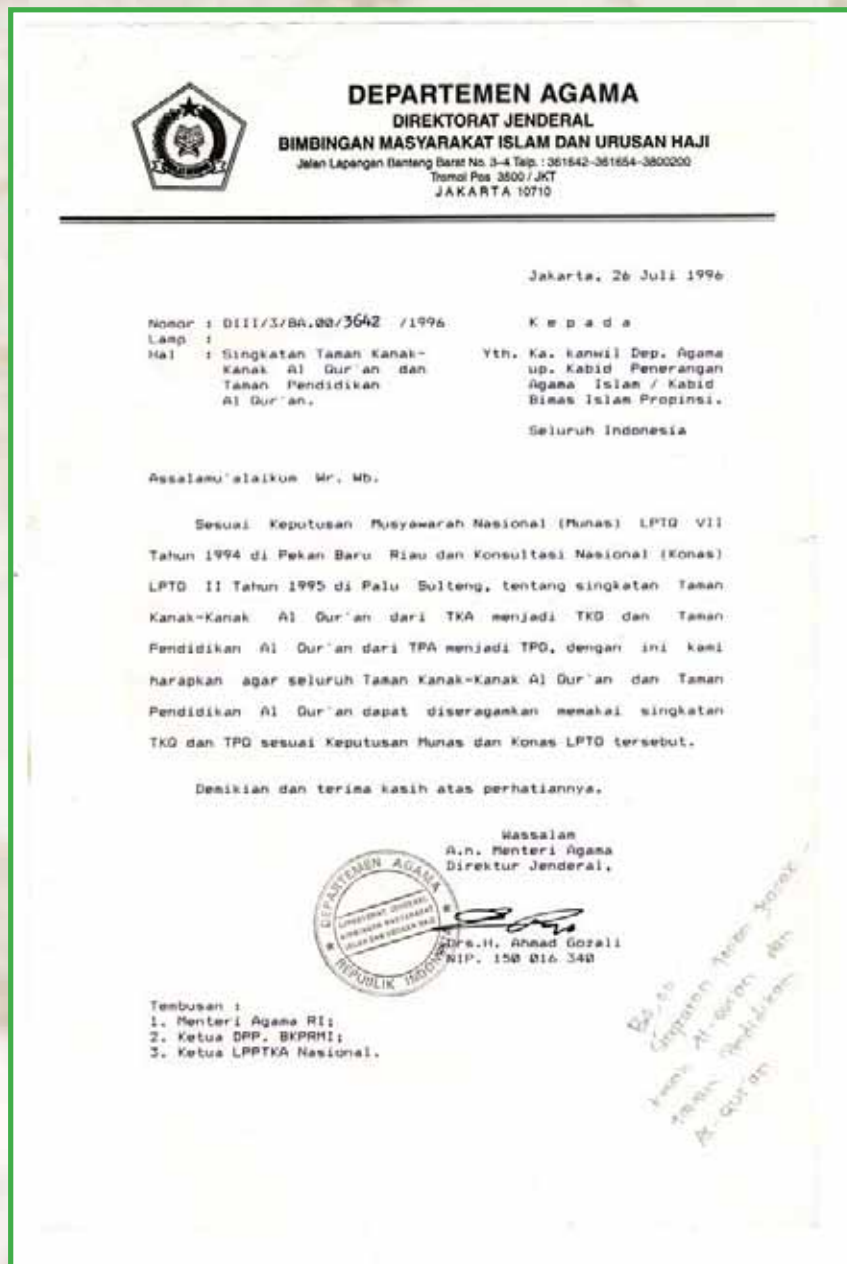
MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1995  
tentang Pembentukan Pengadilan Tinggi Agama di Bengkulu,  
Palu, Kendari dan Kupang, 27 April 1995.

*Sumber: ANRI, Peraturan Perundang-undangan jenis:  
Undang-Undang RI Tahun 1986-1995 No. 3*





Surat dari Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Urusan Haji kepada Kanwil Departemen Agama up. Kabid Penerangan Agama Islam / Kabid Bimas Islam Propinsi tentang Perubahan singkatan Taman Kanak - Kanak Al Qur'an dari TKA menjadi TKQ dan Taman Pendidikan Al Qur'an dari TPA menjadi TPQ, 26 Juli 1996

*Sumber: ANRI, Departemen Agama No.219*



**SOSIAL  
DAN  
BUDAYA**

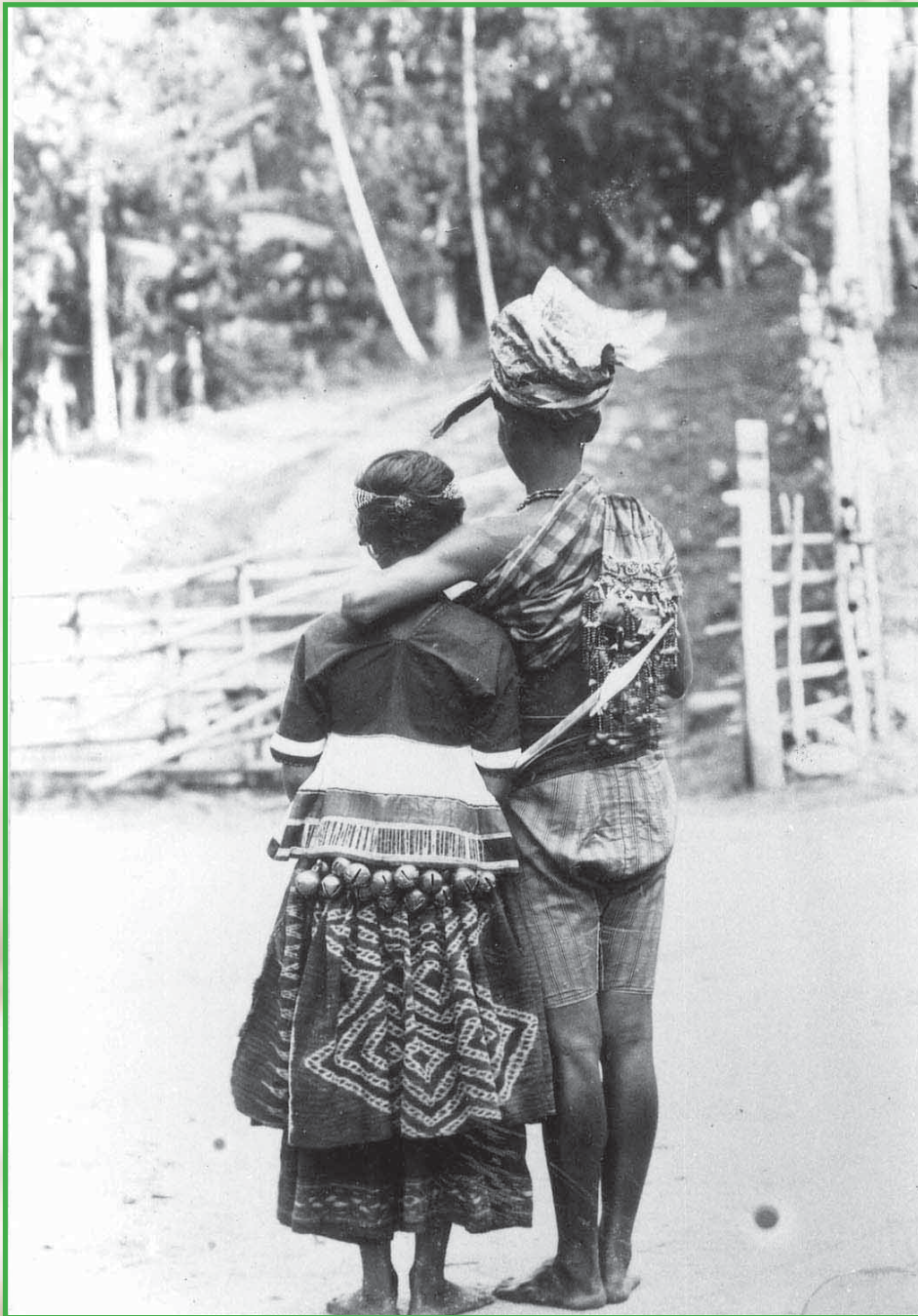




Sepasang muda mudi memakai pakaian daerah,  
Palu, Sulawesi Tengah,  
1920,

*Sumber: ANRI, KIT Sulawesi No. 145/4*





Sepasang muda mudi memakai pakaian daerah,  
dilihat dari belakang, Palu, Sulawesi Tengah,  
1920.

*Sumber: ANRI, KIT Sulawesi No. 145/2*



Sekelompok muda mudi menari tarian daerah, Palu,  
Sulawesi Tengah,  
1920.

*Sumber: ANRI, KIT Sulawesi No. 145/8*





Sekelompok muda mudi berpasang-pasangan memakai pakaian tradisional Palu, Sulawesi Tengah, 1920.

*Sumber: ANRI, KIT Sulawesi No. 146/12*





Sekelompok muda mudi berpasang-pasangan memakai pakaian tradisional Palu, Sulawesi Tengah, 1920.

*Sumber: ANRI, KIT Sulawesi No. 146/14*



Perempuan dalam pakaian khas Donggala,  
12 Oktober 1958.

*Sumber: ANRI, Kempen 581012 TT 3-1*





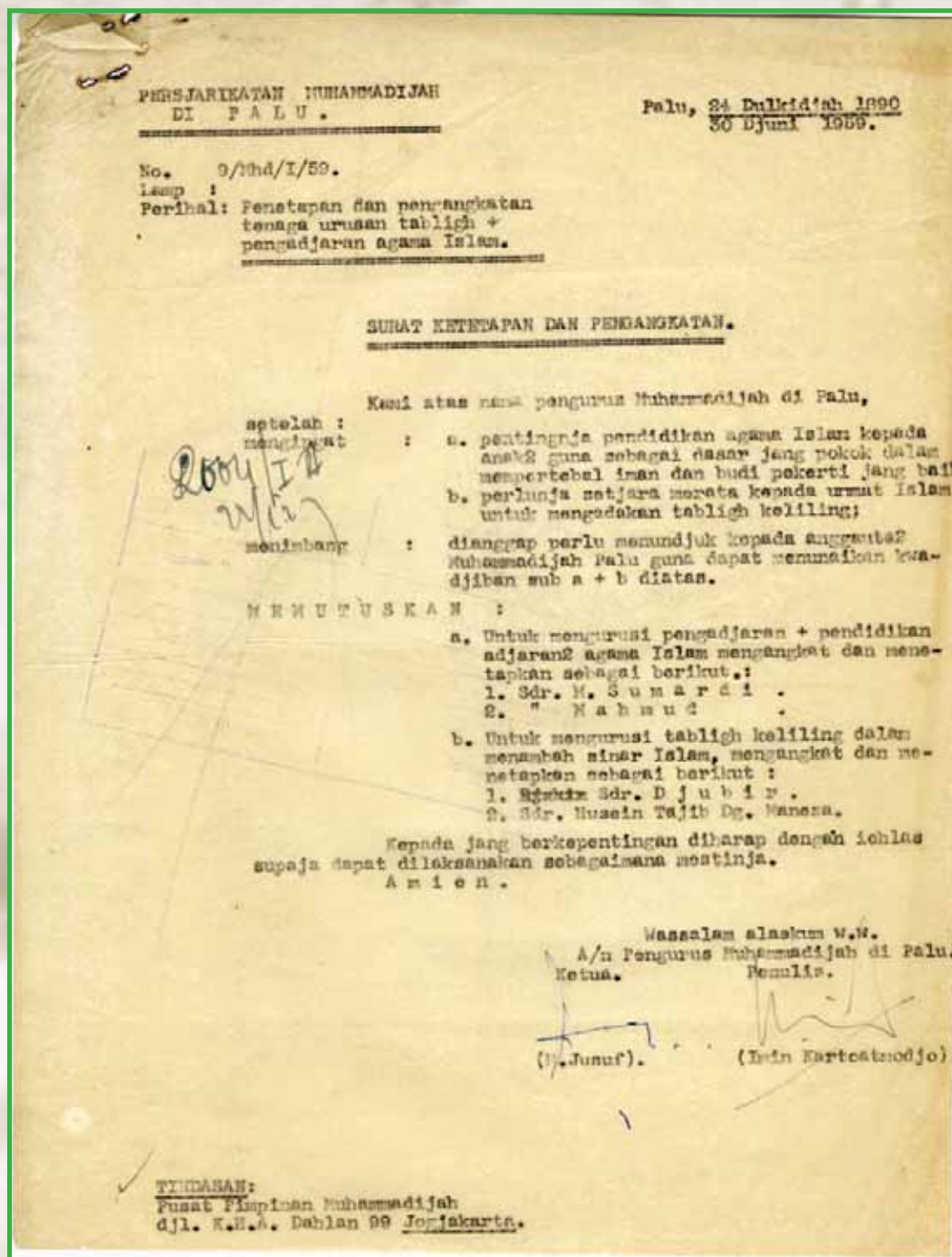
# PENDIDIKAN





Gedung Sekolah di Palu,  
1920.

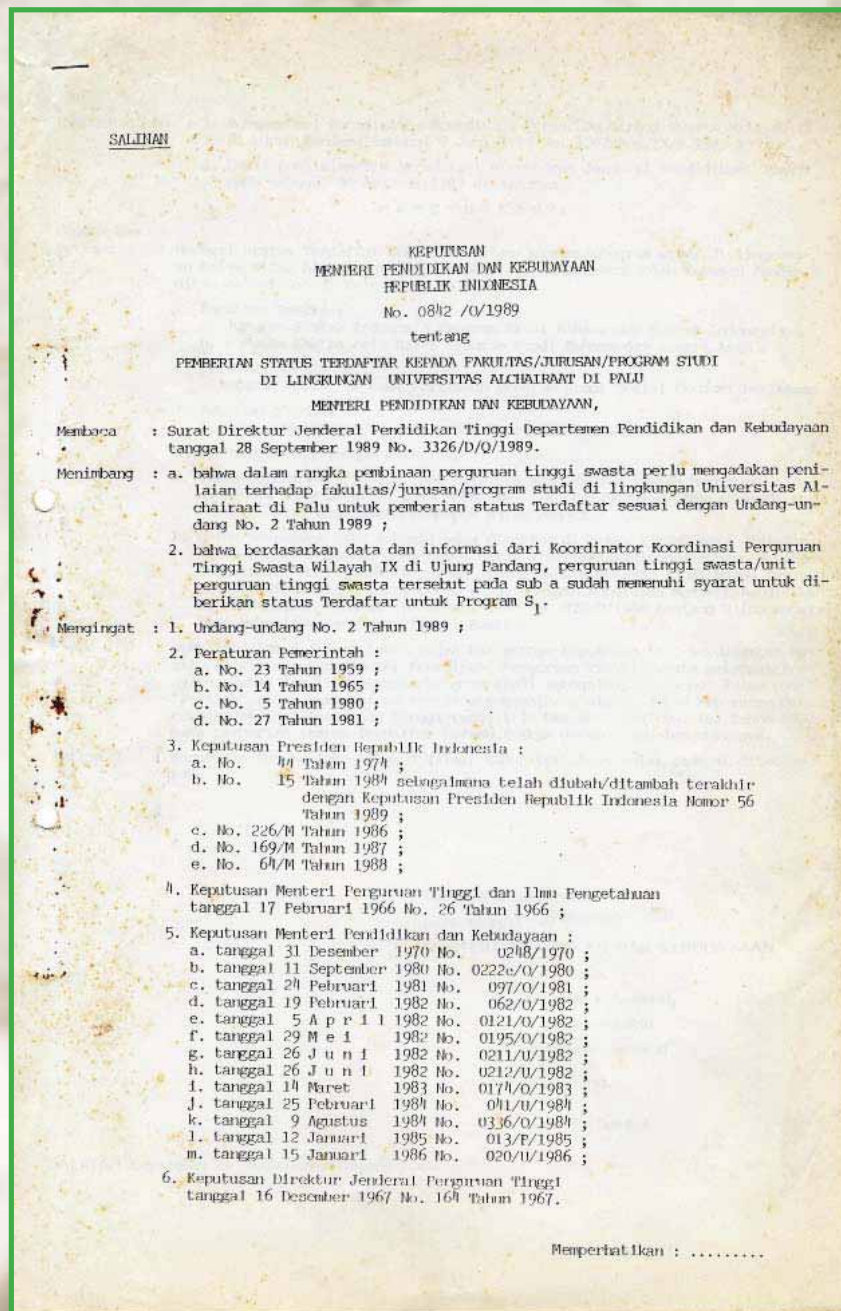
*Sumber: ANRI, KIT Sulawesi 145/64*



Surat ketetapan dan pengangkatan Pengurus Muhammadiyah Palu tentang pengajaran dan pendidikan agama Islam, 30 Juni 1950.

*Sumber: ANRI, PP Muhammadiyah No. 1794*





Keputusan Menteri No. 0842/O/1989 tentang pemberian status terdaftar kepada Fakultas atau Jurusan atau Program Studi di Lingkungan Universitas Alchairaat di Palu,  
6 Desember 1989.

*Sumber: ANRI, Diknas No 433*





# TRANSPORTASI DAN KOMUNIKASI



Orang-orang yang sedang naik perahu di Donggala,  
1920.

*Sumber: ANRI, KIT Sulawesi No. 705/54*



Pelabuhan udara Masowa sekitar 12 Km dari Palu,  
8 April 1958.

*Sumber: ANRI, Kempen 580408 SS 10*





Bomber AURI dengan Pelabuhan Udara Masowa di Palu,  
8 April 1958.

*Sumber: ANRI, Kempen 580408 SS 7*



Memperbaiki hubungan telepon di Palu,  
8 April 1958.

*Sumber: ANRI, Kempen 580408 SS 34*





Kendaraan angkutan di Kota Palu,  
setelah Kota Palu dibebaskan dari Peristiwa,  
11 April 1958.

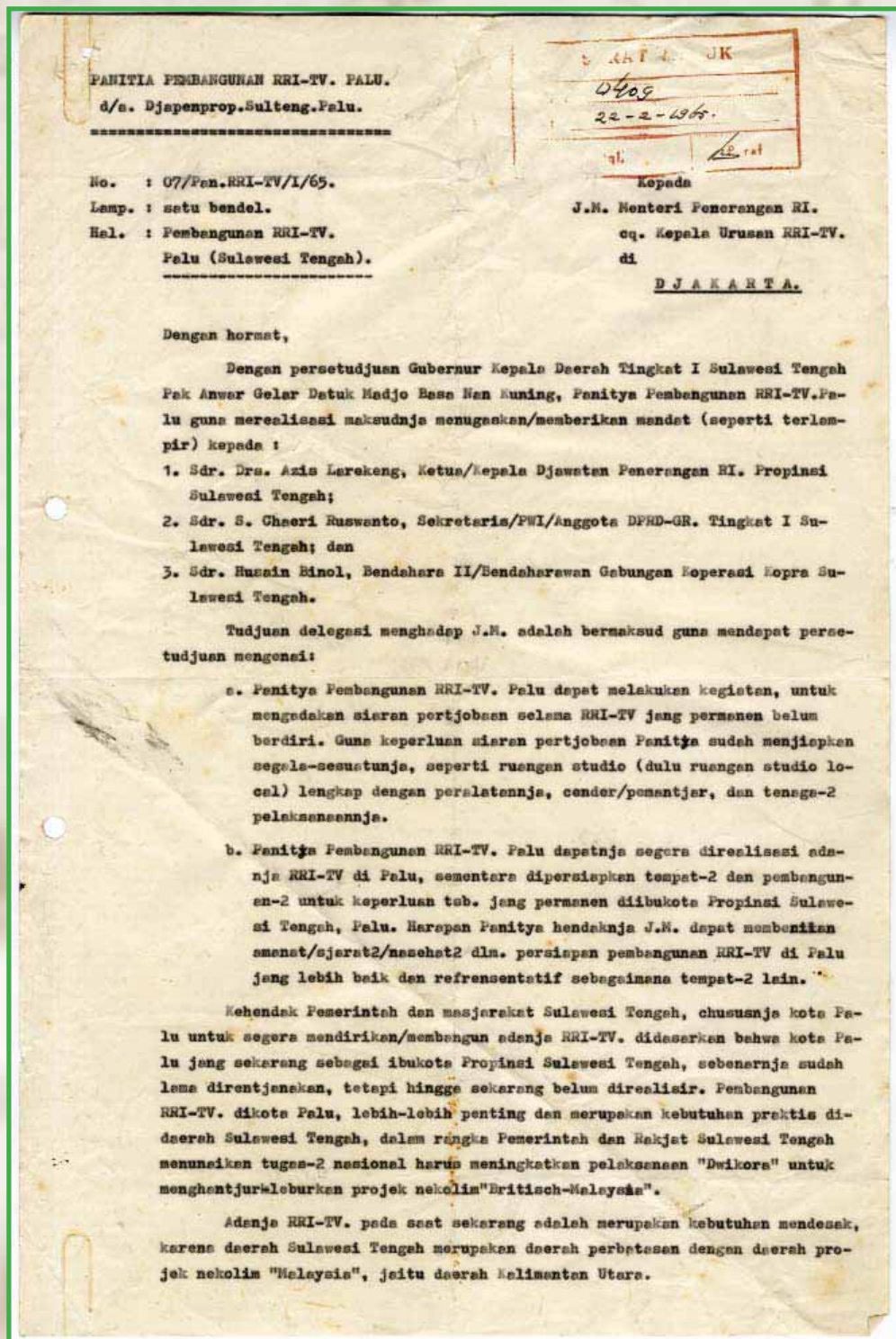
*Sumber: ANRI, Kempen 580411 SS 1*





Sado-sado sedang menunggu penumpang di Pasar Palu,  
11 April 1958.

*Sumber: ANRI, Kempen 580411 SS 4*



Surat dari panitia pembangunan RRI-TV di Palu, Sulawesi Tenggara kepada Menko Kompartimen Hubra mengenai permintaan persetujuan pembangunan RRI-TV Palu, 25 Januari 1965

*Sumber: ANRI, Hubra No. 666*





# INFRASTRUKTUR



Pembangunan Infrastruktur di Palu berkembang sejak masih menjadi dibawah bagian (onderafdeling) Donggala di awal abad ke 20, sekitar tahun 1920 yaitu dengan berdirinya perkantoran, perumahan modern atau rumah sakit. Nota penjelasan tentang irigasi di bagian Timur Palu pada tahun 1932, memperjelas pentingnya sistem pembangunan Infrastruktur Palu setelah dibangunnya Jembatan Penyebrangan Palu pada sekitar tahun 1920. Pembangunan di masa awal kemerdekaan ditandai dengan adanya Gedung Studio RRI (Radio Republik Indonesia) Lokal, Kantor Kas Perbendaharaan Negara maupun kantor Agraria.



Benteng Sumur Kopi, Palu,  
1920.

*Sumber: ANRI, KIT Sulawesi No. 145/86*



Rumah administrator di Palu,  
1920.

*Sumber: ANRI, KIT Sulawesi No. 145/82*





Rumah panggung kayu beratap rumbia Trifin Mowa, Donggala, 1920.

*Sumber: ANRI, KIT Sulawesi No. 832/69*



Sebuah kantor di Palu dilihat dari samping, Sulawesi Tengah,  
1920.

*Sumber: ANRI, KIT Sulawesi No. 145/66*





Gedung Elite di Palu, Sulawesi Tengah,  
1920.

*Sumber: ANRI, KIT Sulawesi No. 145/80*





Rumah-rumah penduduk di Donggala,  
1920.

*Sumber: ANRI, KIT Sulawesi No. 832/67*



Jembatan penyeberangan, Palu,  
1920.

*Sumber: ANRI, KIT Sulawesi No. 145/72*





Rumah Sakit di Palu, Sulawesi Tengah,  
1920.

*Sumber: ANRI, KIT 145/70*

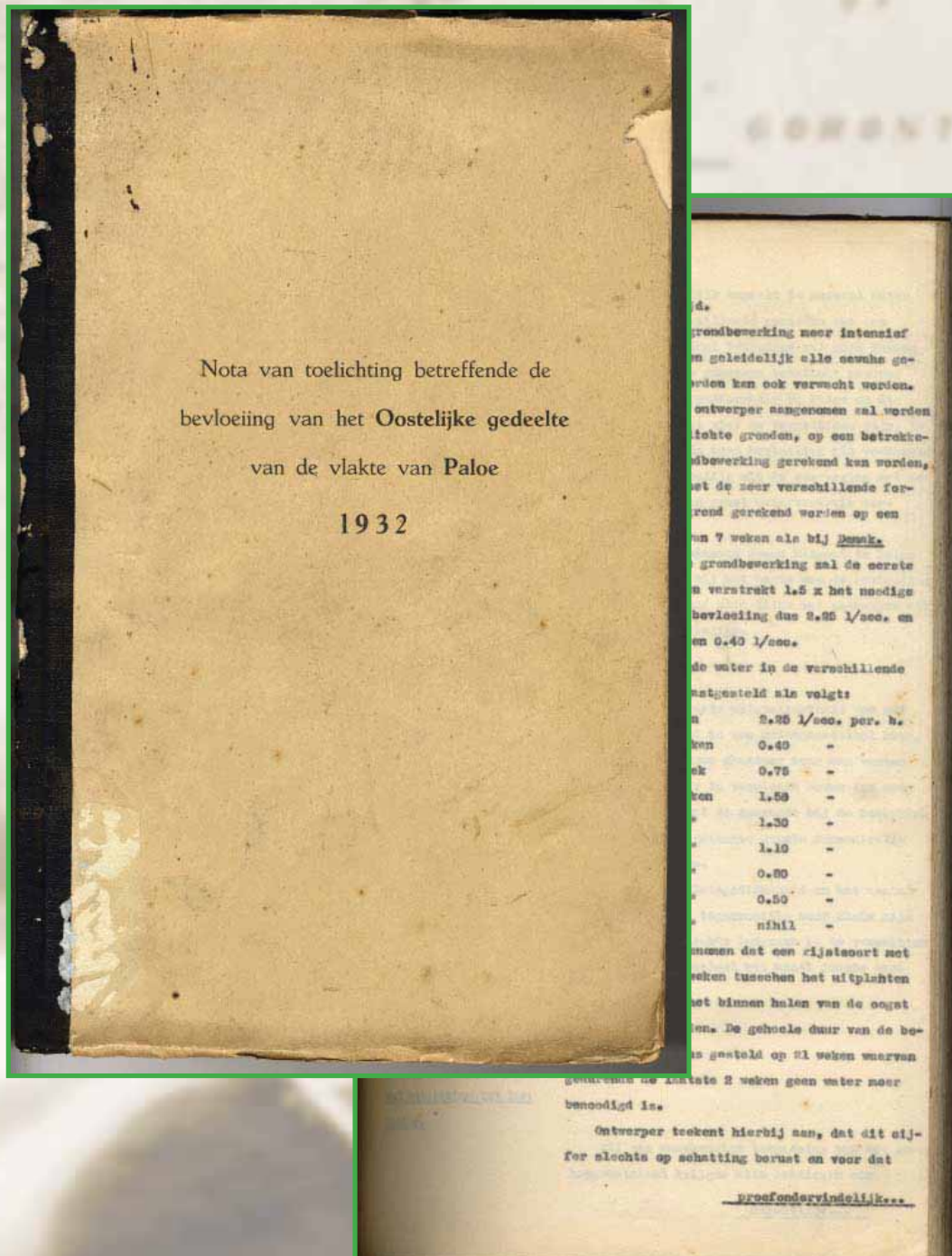




Pintu masuk perbatasan pos jaga dengan ornamen kepala anjing, Palu, Sulawesi Tengah, [1930]

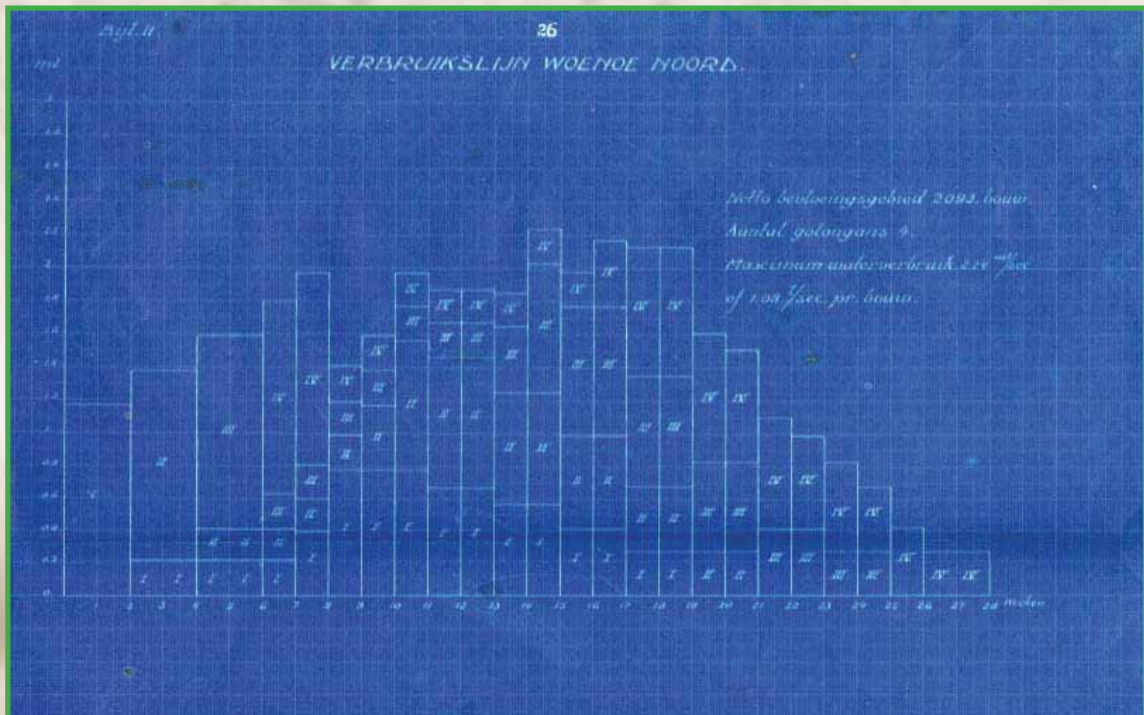
*Sumber: ANRI, KIT 221/10*





Nota penjelasan yang berkaitan dengan irigasi di Bagian Timur dataran Palu, 1932.

*Sumber: ANRI, GB BOW No. 7414*



Lintasan yang dipakai di Utara Woenoe,  
1932.

(Verbruikslijn woenoe noord)

Sumber: ANRI, GB BOW No. 7414





Gedung Studio Radio Republik Indonesia Lokal di Donggala,  
Palu, 9 April 1958.

*Sumber: ANRI, Kempen 580409 SS 2-1*



Kantor Kas Perbendaharaan Negara di Donggala,  
9 April 1958.

*Sumber: ANRI, Kempen 580409 SS 2-2*



Kantor Agraria Kawedanaan Donggala dan Kantor Panitia  
Aksi Pembebasan Irian Barat, Donggala,  
9 April 1958.

*Sumber: ANRI, Kempen 580409 SS 2-3*





Rumah penduduk di Donggala, Sulawesi Tengah,  
10 April 1958.

*Sumber: ANRI, Kempen 580410 SS 1-2*



Kantor Jawatan Penerangan Kabupaten Donggala yang hancur akibat bom Permesta dilihat dari sebelah dalam, 30 Mei 1958.

*Sumber: ANRI, Kempen 580530 SS 6*




**KWARTIR DAERAH GERAKAN PRAMUKA**  
**DATI I SULAWESI TENGAH**  
 Jln. Setia Budi No. 9 Palu

---

LAPORAN PELAKSANAAN PEMBANGUNAN GEDUNG  
 LEMDIKA SULAWESI TENGAH.-

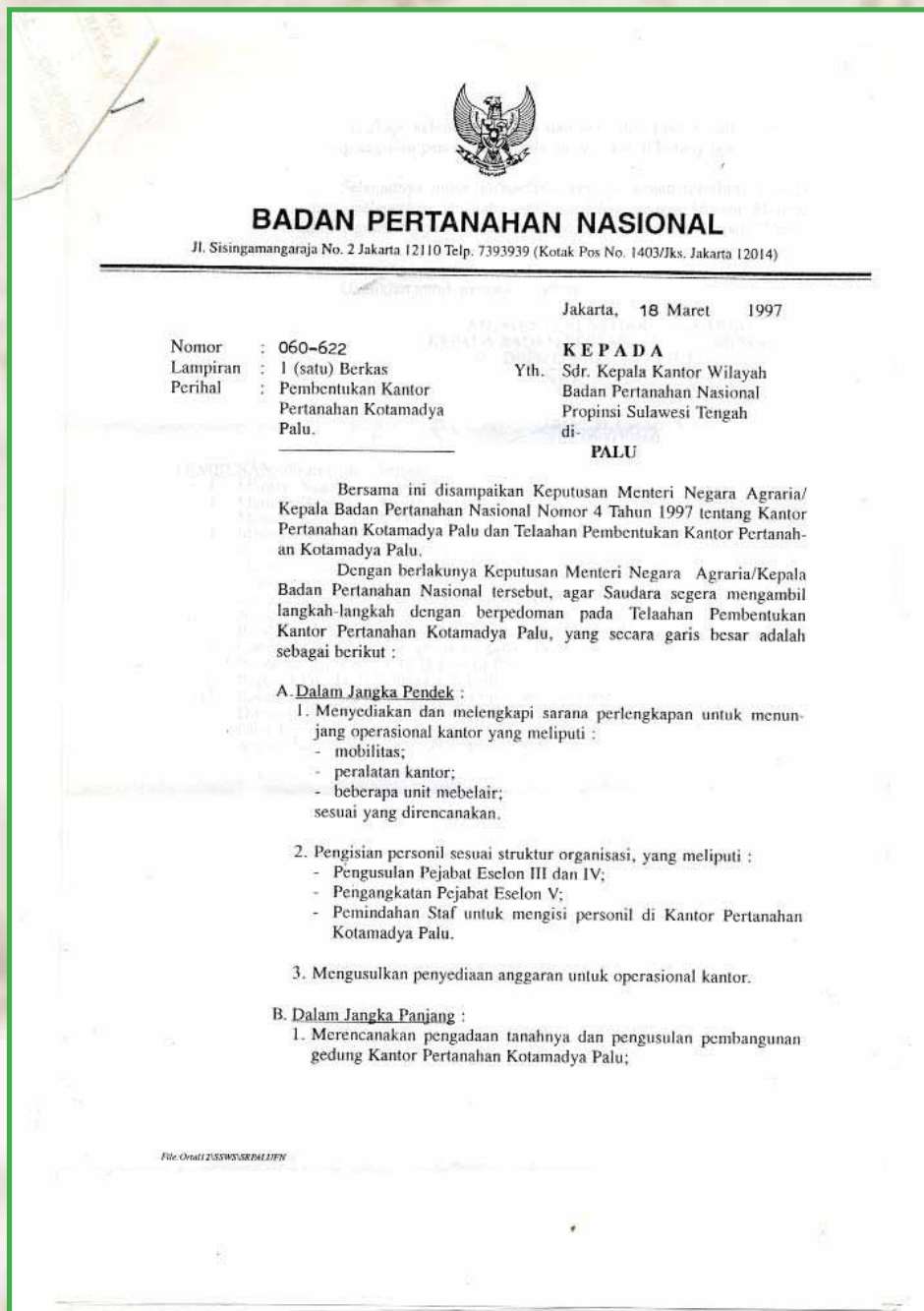
---

1. NAMA PROYEK	- Sub Proyek Bantuan Aktivitas Pramuka Sulawesi Tengah di Palu, tahun 76/77.
2. DANA DIP	- Rp.20.000.000,-
3. Luas Bangunan	- 400 M <sup>2</sup> (10 x 40 )M.
4. Lokasi	- Paneki Kecamatan Sigi Birosaru, Kabupaten Donggala.
4. Luas areal tanah	- 5 (lima)Ha.
5. Status tanah	- Hak Pakad (sesuai Berita Acara Serah-Terima dari Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah tgl.26-8-76 Nomor: 25/Kenra-541/1976.
6. Sumbangan Pemerintah Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah.	
a. Tanah untuk bangunan	- 5 (lima)ha dikelilingi pagar besi/kawat.
b. Satu buah bangunan Gedung-Permanen yang terdiri dari :	- Ruang belajar       - 1 buah - Ruang Pimpinan   - 1 buah - Ruang Gudang     - 2 buah - Ruang WC         - 3 buah
c. Perabot/mebiler	- 100 buah kursi
d. Saluran air/irigasi	- 5 buah lemari
Gedung tsb. didirikan tahun 1971/1972 dengan ukuran	- panjang 300 meter + bak penampung.
Biaya keseluruhan	- 10 X 30 (300 M <sup>2</sup> ) - Rp.18.000.000.-



Laporan pelaksanaan pembangunan gedung Lemdika, 1976  
*Sumber: ANRI, Kwarnas Gerakan Pramuka 150*





Surat dari deputi bidang umum kepada Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Sulteng tentang pembentukan kantor pertanahan Kotamadya Palu, 18 maret 1997

*Sumber: ANRI, Badan Pertanahan Nasional No. 513*



# PEREKONOMIAN





Suasana Pasar (Balairung) di Palu, Sulawesi Tengah,  
1920.

*Sumber: ANRI, KIT Sulawesi No. 145/74*





Suasana Pasar (Balairung) di Palu, Sulawesi Tengah,  
1920.

*Sumber: ANRI, KIT Sulawesi No. 145/76*



Perempuan di pasar di Palu,  
7 Oktober 1924.

*Sumber: ANRI, KIT Sulawesi No. 124/69*





Kedaaan di Pasar Palu yang telah dibebaskan dari Peremesta,  
jual beli berjalan lancar,  
12 April 1958.

*Sumber: ANRI, Kempen 580412 SS 3*





Orang-orang telah mulai berjualan di Pasar Palu,  
setelah peristiwa Permesta,  
12 April 1958.

*Sumber: ANRI, Kempen 580412 SS 1*

# DAFTAR ARSIP



## **A. GEOGRAFIS**

1. Peta Paloe (Palu), 1941.  
Sumber: ANRI, Kartografi Indonesia No.2527/Blad 76-77, Batavia 1941
2. Peta Donggala-Zuid (Donggala Selatan), 1941  
Sumber: ANRI, Kartografi Indonesia No.2523/Blad 74-75, Batavia 1941

## **B. POLITIK DAN PEMERINTAHAN**

3. Salinan Kontrak Perjanjian antara Pemerintah Hindia Belanda dengan Raja Donggala, bernama Lassa Benawa Sanga Laa Daeng Palona, tanggal 17 September 1854, terdiri dari 21 pasal.  
Sumber: ANRI, Menado 66/2 L
4. Korte Verklaring (Plakat Pendek) antara Moeslaeni, Kepala Daerah Tojo, di Poso, dengan Pemerintah Hindia Belanda, 15 Juli 1916.  
Sumber: ANRI, Besluit 15 Juli 1916 No. 39
5. Laporan dari Asisten Residen Sulawesi Tengah tentang kerusuhan yang terjadi di Palu dilakukan oleh Toma I Dampo dan kawan-kawan, 25 Maret 1917.  
Sumber: ANRI, Besluit 7 November 1917 No. 21
6. Surat Keputusan mengenai besarnya gaji pesuruh di Kantor Asisten Residen Donggala, 2 September 1918.  
Sumber: ANRI, Besluit 2 September 1918 No. 82
7. Surat Keputusan tentang garis batas antara daerah Sulawesi Tengah dan daerah Mamuju berdasarkan usul dari Wentholt (Gubernur Sulawesi dan daerah sekitarnya) dengan proses verbal yang ditandatangani oleh kontrolir Donggala, Raja Banawa, Kontrolir Palu, Raja Palo, Raja Dolo, Raja Tobaku, Raja Banao, 7 Maret 1919.  
Sumber: ANRI, Besluit 7 Maret 1919 No. 34
8. Para pejabat di Palu, Sulawesi Tengah, 1920.  
Sumber: ANRI, KIT Sulawesi No. 145/50
9. Menteri Hardi meninggalkan Palu, sedang memeriksa barisan kehormatan, 12 Oktober 1958  
Sumber: ANRI, Kempen 581012 TT 11

10. Menteri Hardi sedang melihat dan memeriksa senjata bekas rampasan dari Permesta di Palu, Sulawesi Utara, 12 Oktober 1958  
Sumber: ANRI, Kempen 581012 TT 49
11. Menteri Hardi meninjau asrama polisi di Palu Sulawesi Utara, 12 Oktober 1958  
Sumber: ANRI, Kempen 581012 TT 51
12. Menteri Hardi selesai memimpin rapat kerja di Palu, 12 Oktober 1958  
Sumber: ANRI, Kempen Sulut 581012 TT 9
13. Overste Roekminto bertanya jawab dengan para tawanan Permesta di Palu, 8 April 1958.  
Sumber: ANRI, Kempen 580408 SS 26
14. Komandan Operasi Insjaf, Overste Roekminto, meninjau rumah penjara Palu, 8 April 1958.  
Sumber: ANRI, Kempen 580408 SS 20
15. Anggota-anggota Pemuda Revolusioner dari Permesta yang ditawan di penjara Palu, 8 April 1958.  
Sumber: ANRI, Kempen 580408 SS 32
16. Peraturan Pemerintah Pengganti UU (PERPU) No. 47 tahun 1960 tentang pembentukan daerah TK. I Sulawesi Selatan – Tenggara dan daerah TK. I Sulawesi Utara – Tengah, 13 Desember 1960.  
Sumber: ANRI, Sekkab. Perpu No. 77
17. Surat Kuasa kepada S.D. Abdurrahman Aldjufri sebagai pengurus wilayah Partai Nahdatul Ulama Sulawesi Tengah di Palu, 7 September 1964.  
Sumber: ANRI, Nahdatul Ulama No. 472
18. Naskah pidato pada kunjungan kerja ke Palu, Sulawesi Tengah, 12 April 1971.  
Sumber: ANRI, Pidato Presiden Soeharto 1966-1998 No. 458
19. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1978 tentang Pembentukan Kota Administratif Palu, 1978.  
Sumber: ANRI, Peraturan Perundang-undangan jenis: Undang-Undang RI Tahun 1986-1995 No. 4

20. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1994 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Palu, 1994. Sumber: ANRI, Peraturan Perundang-undangan jenis: Undang-Undang RI TAHUN 1986-1995 No. 4
21. Laporan Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 1997 Kotamadya Daerah Tingkat II Palu, 1997.  
Sumber: ANRI, Komisi Pemilihan Umum 1971-1999 No. 944.1

### C. KEAGAMAAN

22. Nisan dan makam Raja Gowa terakhir di areal Masjid Donggala, 1920.  
Sumber: ANRI, KIT Sulawesi No. 815/62
23. Surat dari Pimpinan Muhammadiyah Cabang Donggala kepada Pimpinan Pusat Muhammadiyah tentang permohonan untuk memberikan surat ketetapan berdirinya Muhammadiyah Cabang Palu, 28 Desember 1959.  
Sumber: ANRI, PP Muhammadiyah No. 2401
24. Surat Keputusan mengenai pengesahan berdirinya Cabang Muhammadiyah Daerah Tingkat II Donggala, Palu, 1962.  
Sumber: ANRI, PP Muhammadiyah Yogyakarta No. 2087
25. Mandat dari pengurus besar "Alchairat" Pusat di Palu kepada S. Abdur Rahman Bin Sjech Aidjufri sebagai wakil ketua IP.B. Alchairaat, 8 September 1964.  
Sumber: ANRI, Nahdatul Ulama No. 473
26. Surat dari Pengurus Besar Nahdatul Ulama kepada Pengurus Nahdatul Ulama wilayah Palu untuk menjaga hubungan baik dengan Nawawian Abdullah, mantan Wakil Rois Syuriah Wilayah Nahdatul Ulama Kalimantan Tengah, 1972  
27. Sumber: ANRI, Nahdatul Ulama No. 619
28. Usulan proyek pembinaan warga Gereja Synode Gereja Protestan Indonesia di Donggala, September 1979.  
Sumber: ANRI, Depag No.092
29. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1995 tentang Pembentukan Pengadilan Tinggi Agama di Bengkulu, Palu, Kendari



dan Kupang, 27 April 1995.

Sumber: ANRI, Peraturan Perundang-undangan jenis: Undang-Undang RI Tahun 1986-1995 No. 3

30. Surat dari Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Urusan Haji kepada Kanwil Departemen Agama up. Kabid Penerangan Agama Islam / Kabid Bimas Islam Propinsi tentang Perubahan singkatan Taman Kanak - Kanak Al Qur'an dari TKA menjadi TKQ dan Taman Pendidikan Al Qur'an dari TPA menjadi TPQ, 26 Juli 1996  
Sumber: ANRI, Departemen Agama No.219

#### **D. SOSIAL DAN BUDAYA**

31. Sepasang muda mudi memakai pakaian daerah, Palu, Sulawesi Tengah, 1920.  
Sumber: ANRI, KIT Sulawesi No. 145/4
32. Sepasang muda mudi memakai pakaian daerah, dilihat dari belakang, Palu, Sulawesi Tengah, 1920.  
Sumber: ANRI, KIT Sulawesi No. 145/2
33. Sekelompok muda mudi menari tarian daerah, Palu, Sulawesi Tengah, 1920.  
Sumber: ANRI, KIT Sulawesi No. 145/8
34. Sekelompok muda mudi berpasang-pasangan memakai pakaian tradisional Palu, Sulawesi Tengah, 1920.  
Sumber: ANRI, KIT Sulawesi No. 146/12
35. Sekelompok muda mudi berpasang-pasangan memakai pakaian tradisional Palu, Sulawesi Tengah, 1920.  
Sumber: ANRI, KIT Sulawesi No. 146/14
36. Perempuan dalam pakaian khas Donggala, 12 Oktober 1958.  
Sumber: ANRI, Kempen 581012 TT 3-1

#### **E. PENDIDIKAN**

37. Gedung Sekolah di Palu, 1920.  
Sumber: ANRI, KIT Sulawesi 145/64
38. Surat ketetapan dan pengangkatan Pengurus Muhammadiyah Palu tentang pengajaran dan pendidikan agama Islam, 30 Juni 1950  
Sumber: ANRI, PP Muhammadiyah No. 1794

39. Keputusan Menteri No. 0842/O/1989 tentang pemberian status terdaftar kepada Fakultas atau Jurusan atau Program Studi di Lingkungan Universitas Alchiraat di Palu, 6 Desember 1989.  
Sumber: ANRI, Diknas No 433

#### **F. TRANSPORTASI DAN KOMUNIKASI**

40. Orang-orang yang sedang naik perahu di Donggala, 1920.  
Sumber: ANRI, KIT Sulawesi No. 705/54
41. Pelabuhan udara Masowa sekitar 12 Km dari Palu, 8 April 1958.  
Sumber: ANRI, Kempen 580408 SS 10
42. Bomber AURI dengan Pelabuhan Udara Masowa di Palu, 8 April 1958.  
Sumber: ANRI, Kempen 580408 SS 7
43. Memperbaiki hubungan telepon di Palu, 8 April 1958.  
Sumber: ANRI, Kempen 580408 SS 34
44. Kendaraan angkutan di Kota Palu, setelah Kota Palu dibebaskan dari Permesta, 11 April 1958.  
Sumber: ANRI, Kempen 580411 SS 1
45. Sado-sado sedang menunggu penumpang di Pasar Palu, 11 April 1958.  
Sumber: ANRI, Kempen 580411 SS 4
46. Surat dari panitia pembangunan RRI-TV di Palu, Sulawesi Tenggara kepada Menko Kompartimen Hubra mengenai permintaan persetujuan pembangunan RRI-TV Palu, 25 Januari 1965.  
Sumber: ANRI, Hubra No. 666

#### **G. INFRASTRUKTUR**

47. Benteng Sumur Kopi, Palu, 1920.  
Sumber: ANRI, KIT Sulawesi No. 145/86
48. Rumah administrator di Palu, 1920.  
Sumber: ANRI, KIT Sulawesi No. 145/82
49. Rumah panggung kayu beratap rumbia Trifin Mowa, Donggala, 1920.  
Sumber: ANRI, KIT Sulawesi No. 832/69

50. Sebuah kantor di Palu dilihat dari samping, Sulawesi Tengah, 1920.  
Sumber: ANRI, KIT Sulawesi No. 145/66
51. Gedung Elite di Palu, Sulawesi Tengah, 1920.  
Sumber: ANRI, KIT Sulawesi No. 145/80
52. Rumah-rumah penduduk di Donggala, 1920.  
Sumber: ANRI, KIT Sulawesi No. 832/67
53. Jembatan penyeberangan, Palu, 1920.  
Sumber: ANRI, KIT Sulawesi No. 145/72
54. Rumah Sakit di Palu, Sulawesi Tengah, 1920.  
Sumber: ANRI, KIT 145/70
55. Pintu masuk perbatasan pos jaga dengan ornamen kepala anjing, Palu, Sulawesi Tengah, [1930]  
Sumber: ANRI, KIT 221/10
56. Nota penjelasan yang berkaitan dengan irigasi di Bagian Timur dataran Palu, 1932.  
Sumber: ANRI, GB BOW No. 7414
57. Lintasan yang dipakai di Utara Woenoe, 1932. (Verbruikslijn woenoe noord)  
Sumber: ANRI, GB BOW No. 7414
58. Gedung Studio Radio Republik Indonesia Lokal di Donggala, Palu, 9 April 1958.  
Sumber: ANRI, Kempen 580409 SS 2-1
59. Kantor Kas Perbendaharaan Negara di Donggala, 9 April 1958.  
Sumber: ANRI, Kempen 580409 SS 2-2
60. Kantor Agraria Kawedanaan Donggala dan Kantor Panitia Aksi Pembebasan Irian Barat, Donggala, 9 April 1958.  
Sumber: ANRI, Kempen 580409 SS 2-3
61. Rumah penduduk di Donggala, Sulawesi Tengah, 10 April 1958.  
Sumber: ANRI, Kempen 580410 SS 1-2
62. Kantor Jawatan Penerangan Kabupaten Donggala yang hancur akibat bom Permesta dilihat dari sebelah dalam, 30 Mei 1958.  
Sumber: ANRI, Kempen 580530 SS 6



63. Laporan pelaksanaan pembangunan gedung Lemdika, 1976  
Sumber: ANRI, Kwarnas Gerakan Pramuka 150
64. Surat dari deputi bidang umum kepada Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Sulteng tentang pembentukan kantor pertanahan Kotamadya Palu, 18 maret 1997  
Sumber: ANRI, Badan Pertanahan Nasional No. 513

#### **H. PEREKONOMIAN**

65. Suasana Pasar (Balairung) di Palu, Sulawesi Tengah, 1920.  
Sumber: ANRI, KIT Sulawesi No. 145/74
66. Suasana Pasar (Balairung) di Palu, Sulawesi Tengah, 1920.  
Sumber: ANRI, KIT Sulawesi No. 145/76
67. Perempuan di pasar di Palu, 7 Oktober 1924.  
Sumber: ANRI, KIT Sulawesi No. 124/69
68. Keadaan di Pasar Palu yang telah dibebaskan dari Permesta, jual beli berjalan lancar, 12 April 1958.  
Sumber: ANRI, Kempen 580412 SS 3
69. Orang-orang telah mulai berjualan di Pasar Palu, setelah peristiwa Permesta, 12 April 1958.  
Sumber: ANRI, Kempen 580412 SS 1

**PENUTUP**

## PENUTUP

Program Citra Daerah yang dikembangkan ANRI merupakan salah satu upaya memberdayakan daerah melalui arsip. Hal ini sejalan dengan amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yakni meningkatkan peran daerah di berbagai bidang, termasuk bidang kearsipan.

Arsip sebagai salah satu sumber informasi yang terpercaya dapat menunjukkan keberhasilan maupun kegagalan yang dialami pada masa lalu untuk diaplikasikan secara adaptif dan kontekstual dalam merencanakan pembangunan di daerah yang semakin kompleks.

“Citra Kota Palu Dalam Arsip” diharapkan dapat ditindaklanjuti oleh Pemerintah Kota Palu dengan menyebarkanluaskannya kepada masyarakat umum, khususnya generasi muda.

Penyebarluasan ini sangat penting artinya karena dapat memberikan dorongan kepada masyarakat luas untuk mempelajari dan menggali lebih dalam lagi informasi mengenai penyelenggaraan kehidupan kebangsaan dalam lingkup daerah.

Pada gilirannya arsip dapat menjadi memori kolektif daerah yang berfungsi sebagai pemberi semangat dalam menumbuhkan rasa kebanggaan sebagai bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia



**Pengarah**

**Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia**

Mustari Irawan

**Deputi Bidang Konservasi Arsip**

M. Taufik

**Ketua**

Agus Santoso

**Editor**

Senja Kala Yahya

**Anggota**

R. Suryagung

Abdul Cholik

Bayu Patriasari

Desi Mulyaningsih



## Arsip Nasional Republik Indonesia

Jl. Ampera Raya No. 7, Cilandak Timur, Pasar Minggu, Jakarta Selatan

Telp. 62-21-7805851, Fax.62-21-7810280, 7805812

[http//www.anri.go.id](http://www.anri.go.id), e-mail: [info@anri.go.id](mailto:info@anri.go.id)